

Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang Demokratis dan Terdesentralisasi



Mohammad Zulfan Tadjoeddin
Western Sydney University, Australia

Athia Yumna
The SMERU Research Institute

Sarah E. Gultom
Monash University, Malaysia

M. Fajar Rakhmadi
The SMERU Research Institute

M. Firman Hidayat
The Ministry of National Development Planning (Bappenas)

Asep Suryahadi
The SMERU Research Institute

KERTAS KERJA SMERU

**Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang
Demokratis dan Terdesentralisasi**

Mohammad Zulfan Tadjoeddin
(Western Sydney University, Australia)

Athia Yumna
(The SMERU Research Institute)

Sarah E. Gultom
(Monash University, Malaysia)

M. Fajar Rakhmadi
(The SMERU Research Institute)

M. Firman Hidayat
(Bappenas)

Asep Suryahadi
(The SMERU Research Institute)

Editor

Liza Hadiz

The SMERU Research Institute

Desember 2017

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Mohammad Zulfan Tadjoeeddin.

Ketimpangan dan stabilitas di Indonesia yang demokratis dan terdesentralisasi.
/ Ditulis oleh Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, et.al.; Disunting oleh: Liza Hadiz
vi, 34 p.; 30 cm.

Termasuk indeks.

ISBN 978-602-7901-42-1

1. Ketimpangan. I. Judul

362.5--ddc22



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Foto Sampul: M. Fajar Rakhmadi (The SMERU Research Institute)

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Neil McCulloch, David Gottlieb, dan Sudarno Sumarto atas komentar-komentarnya terhadap draf kertas kerja sebelumnya. Namun, kesalahan dan kelemahan yang masih ditemukan pada publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Kertas kerja ini merupakan terjemahan dari kertas kerja The SMERU Research Institute berjudul *Inequality and Stability in Democratic and Desentralized Indonesia* yang diterbitkan pada 2016. Terima kasih kepada penerjemah, Arya Wisesa, dan penyunting, Ricky Zulkifri, yang telah membantu menyiapkan naskah berbahasa Indonesia.

Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang Demokratis dan Terdesentralisasi

Mohammad Zulfan Tadjoeddin (*Western Sydney University, Australia*), Athia Yumna (*The SMERU Research Institute*), Sarah E. Gultom (*Monash University, Malaysia*), M. Fajar Rakhmadi (*The SMERU Research Institute*), M. Firman Hidayat (*Bappenas*), dan Asep Suryahadi (*The SMERU Research Institute*)

Ketimpangan ekonomi di Indonesia makin meningkat dan belakangan ini mencapai rekor tertinggi 0,41 yang diukur berdasarkan indeks Gini pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain implikasi ekonomi, isu meningkatnya ketimpangan juga penting secara sosial dan politik karena bisa membahayakan stabilitas masyarakat, terutama di negara demokrasi yang besar, muda, dan beragam seperti Indonesia yang diganggu oleh merebaknya kemiskinan dan kerentanan di tengah meningkatnya harapan. Studi ini menemukan dukungan empiris atas efek meningkatnya kekerasan sebagai akibat dari makin tingginya ketimpangan pada kabupaten/kota di sejumlah provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah “tinggi konflik”. Hasilnya tegar (*robust*) setelah dilakukan kontrol terhadap efek provinsi dan efek waktu, fraksionalisasi etnis dan agama serta serangkaian faktor penentu kekerasan, dan juga berbagai tindak kekerasan yang berbeda. Bukti baru ini menyiratkan bahwa penting untuk menyertakan langkah-langkah guna mengatasi ketimpangan sebagai fokus eksplisit dalam agenda pembangunan.

Kata kunci: ketimpangan dan stabilitas, ketimpangan dan kekerasan, panel kabupaten, kejahatan di Indonesia

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
II. MENGAPA DAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN STABILITAS	3
III. KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN	8
IV. KETIMPANGAN DAN KONFLIK	10
V. STRATEGI ESTIMASI EMPIRIS	12
VI. HASIL	15
6.1 Kekerasan Rutin	15
6.2 Kejahatan Kekerasan	17
6.3 Kekerasan Etnis	18
6.4 Uji Ketegaran	20
VII. KESIMPULAN	21
DAFTAR ACUAN	22
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Korban Tewas dalam Kekerasan Rutin, 2005–2012	6
Tabel 2. Insiden Kekerasan Rutin, 2005–2012	7
Tabel 3. Wilayah Cakupan SNPK	13
Tabel 4. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Rutin (Regresi Negatif Binomial)	16
Tabel 5. Ketimpangan Vertikal dan Kejahatan dengan Kekerasan (Regresi Negatif Binomial)	18
Tabel 6. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Etnis (Regresi Negatif Binomial)	19
Tabel 7. Ketimpangan Horizontal dan Kekerasan Etnis (Regresi Binomial Negatif)	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Insiden kekerasan kolektif di daerah yang sebelumnya “tinggi konflik”, 2005–2012	5
Gambar 2. Kematian akibat kekerasan kolektif di daerah yang sebelumnya “tinggi konflik”, 2005–2012	6
Gambar 3. Kekerasan Rutin: Insiden dan Kerusakan yang Ditimbulkan, 2005–2012	7
Gambar 4. Kekerasan Etnis: Insiden dan Kerusakan yang Ditimbulkan, 2005–2012	8
Gambar 5. Ketimpangan Vertikal (Gini), Pendapatan, dan Kekerasan	17

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Tabel A1. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Rutin (Ukuran Kematian)	29
LAMPIRAN 2 Tabel A2. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Etnis (Ukuran Kematian)	30
LAMPIRAN 3 Tabel A3. Ketimpangan Horizontal dan Kekerasan Etnis (Ukuran Kematian)	31
LAMPIRAN 4 Tabel A4. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Rutin (Lag Variabel Bebas)	32
LAMPIRAN 5 Tabel A5. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Etnis (Lag Variabel Bebas)	33
LAMPIRAN 6 Tabel A6. Ketimpangan Vertikal dan Tindak Kriminal dengan Kekerasan (Lag Variabel Bebas)	34

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

GAM	Gerakan Aceh Merdeka
OPM	Organisasi Papua Merdeka
PDP	Presidium Dewan Papua
PDRB	produk domestik regional bruto
SIRA	Sentra Informasi Referendum Aceh
SNPK	Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan
UNDP	United Nations Development Programme
UNSFIR	United Nations Support Facility for Indonesian Recovery

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya ketimpangan pendapatan telah menjadi perhatian global dalam beberapa tahun belakangan. Ketimpangan pendapatan di sebagian besar negara maju dan beberapa negara berkembang yang besar tampak meningkat dalam dua dasawarsa terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, ketimpangan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) mengalami peningkatan di 65 dari 130 negara; dan negara-negara tersebut adalah rumah bagi lebih dari dua pertiga penduduk dunia (United Nations, 2013). Perekonomian Amerika Serikat yang merupakan episentrum dua krisis ekonomi global besar pada abad ke-20—Depresi Besar (the Great Depression) yang dimulai pada 1929 dan krisis keuangan global (*global financial crisis*) dimulai pada 2007—mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang tajam mendekati kedua peristiwa besar itu (Kumhof dan Rancière, 2010; Rajan, 2010).

Meningkatnya ketimpangan, khususnya antara 1% orang terkaya dan 99% sisanya, dan keserakahan pihak korporasi adalah titik-pusat dari gerakan Pendudukan Wall Street (*Occupy Wall Street*) yang dimulai di Amerika Serikat dan menyebar ke sejumlah negara maju lainnya (Dube dan Kaplan, 2012). Belum lama ini, Paus Fransiskus menyatakan bahwa “kesenjangan merupakan akar dari kejahatan sosial” (Christian, 2014) dan Barack Obama menyebut ketimpangan pendapatan sebagai “tantangan yang sangat menentukan zaman kita” (Newell, 2013). Sementara itu, Piketty (2014) berpendapat bahwa meningkatnya ketimpangan sesungguhnya tertanam dalam sistem ekonomi kapitalis karena imbal hasil atas modal (*returns on capital*) mengalami kenaikan makin tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sejak pertengahan abad ke-20.

Indonesia memiliki masalah serupa dengan naiknya ketimpangan pendapatan, terutama setelah krisis ekonomi akhir 1990-an dan reformasi yang menyusulnya. Sejauh ini, kekhawatiran dengan ketimpangan (vertikal) secara keseluruhan di Indonesia terutama didorong oleh evolusi koefisien Gini dari pengeluaran rumah tangga per kapita yang diperoleh dari Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas). Sebagian kalangan mengatakan bahwa selama periode “keajaiban Asia Timur” (*East Asian miracle*) sebelum krisis keuangan Asia (*Asian financial crisis/AFC*) 1997, perekonomian Indonesia tidak mengikuti prediksi Kuznets (1955) mengenai *trade-off* antara pendapatan dan pemerataan pada tahap-tahap awal pembangunan. Tiga dasawarsa pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan berhasil dicapai sembari mempertahankan tingkat ketimpangan secara keseluruhan yang relatif konstan yang diukur dengan koefisien Gini pengeluaran rumah tangga (sekitar 0,33) (World Bank, 1993).

Namun, cerita Indonesia pada masa pascakrisis tampak berbeda. Sementara pemulihan ekonomi dari krisis keuangan Asia berlangsung cukup cepat dan pertumbuhannya dinilai cukup tegar (*robust*) di tengah krisis keuangan global (*global financial crisis/GFC*) dewasa ini, ketimpangan secara keseluruhan justru meningkat. Rasio Gini pengeluaran rumah tangga mencapai rekor tertinggi, yakni 0,41 pada 2011 dan 2012, yang untuk kali pertama melampaui tingkat peringatan (*warning level*) 0,4.¹ Sejak 2011, Indonesia bisa digolongkan negara berpendapatan rendah dengan ketimpangan tinggi, bergeser dari negara dengan pendapatan rendah dan ketimpangan rendah satu dasawarsa sebelumnya (Yusuf, 2014).

¹Angka koefisien Gini 0.4 dianggap sebagai tingkat peringatan internasional untuk tingkat ketimpangan yang berbahaya. Ini adalah petunjuk yang secara luas dikutip ketika Tiongkok menerbitkan indeks Gini-nya pada awal 2013 untuk kali pertama dalam 12 tahun; lihat, misalnya, “China’s ‘Above Warning Level’ Income Gap Shows Inequality” (<http://www.globaltimes.cn/Content/756786.shtml>) dan ‘Gini Coefficient Release Highlights China’s Resolve to Bridge Wealth Gap’ (http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-01/21/c_132116852.htm).

Pendekatan yang hati-hati harus diambil bila kita menggunakan koefisien Gini pengeluaran rumah tangga berdasarkan data Susenas dalam mengukur besaran ketimpangan ekonomi di Indonesia, baik semasa “keajaiban” ekonomi Orde Baru maupun selama kurun waktu meningkatnya ketimpangan dewasa ini. Bisa dikatakan bahwa koefisien Gini pengeluaran rumah tangga data Susenas cenderung menaksir terlalu rendah tingkat ketimpangan ekonomi yang sebenarnya. Alasan untuk itu pertama-tama adalah masalah konseptual, namun juga menyangkut soal teknis.

Pada aras konseptual, bila menggunakan indeks Gini pengeluaran konsumsi, harus diingat bahwa konsumsi jelas berbeda dari pendapatan, apalagi dengan kekayaan atau aset. Pengeluaran konsumsi hanya mewakili sebagian dari pendapatan yang diperoleh rumah tangga biasa dan memiliki efek memperhalus (*smoothing effect*) melalui tabungan dan penarikan dana. Dalam jangka panjang, pendapatan diakumulasi dalam bentuk kekayaan atau aset yang tumbuh yang diperoleh dari keuntungan modal atau laba atas investasi (*capital gain*). Oleh karena itu, menurut definisi, ketimpangan pengeluaran akan selalu lebih rendah daripada ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan seharusnya kurang dari ketimpangan kekayaan.² Ketimpangan ekonomi bisa merujuk pada satu dari ketimpangan-ketimpangan tersebut, apakah konsumsi, pendapatan, atau kekayaan.

Untuk alasan teknis, sifat penarikan atau pengambilan sampel Susenas cenderung gagal menangkap konsumsi kelompok-kelompok penduduk berpenghasilan sangat tinggi dan sangat rendah; boleh jadi karena sulit menjalin kontak dengan kelompok-kelompok tersebut dan data yang terkumpul mungkin saja tidak mencerminkan pola konsumsi yang sebenarnya (Yusuf, 2006). Oleh karena itu, jika Indonesia risau dengan kenaikan rasio Gini pengeluaran dewasa ini yang telah melampaui tingkatan peringatan, dapat dibayangkan besaran ketimpangan ekonomi sesungguhnya berdasarkan ukuran pendapatan atau kekayaan.

Setidaknya ada dua potensi dampak dari ketimpangan yang dilaporkan dengan baik dalam literatur yang ada. *Pertama*, berkenaan dengan pengaruhnya pada kinerja perekonomian atau kemakmuran. *Kedua*, bagaimana ketimpangan bisa memengaruhi stabilitas masyarakat. Kedua efek tersebut penting dan juga saling memengaruhi. Di satu sisi, kenaikan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk stabilitas masyarakat. Di sisi lain, stabilitas dipandang sebagai prasyarat yang diperlukan bagi kemakmuran seperti itu. Tujuan kertas kerja ini adalah membahas kemungkinan dampak ketimpangan terhadap stabilitas masyarakat berdasarkan data sosialekonomi baru-baru ini di Indonesia yang demokratis dan terdesentralisasi dengan mengacu pada periode setelah transisi demokrasi yang agak karut-marut sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

Kajian ini memiliki tiga temuan pokok. *Pertama*, ditemukan adanya efek peningkatan kekerasan dari ketimpangan vertikal yang membantu menjelaskan hubungan kurva berbentuk lonceng antara kekerasan dan pendapatan. Ini dilakukan dengan dengan memperlakukan variabel ketimpangan vertikal endogen terhadap pendapatan mengikuti kurva Kuznets. Temuan tersebut khususnya

²Berikut adalah kesaksian tentang kehadiran segelintir elite di Indonesia, namun sangat kaya-raya. Pada 1996, sepuluh keluarga superkaya di Indonesia menguasai 57,7% kapitalisasi pasar saham negeri ini; ini merupakan proporsi tertinggi di kawasan Asia Timur (Claessens, Djankov, dan Lang, 1999). Pada 2011, meski 43 ribu warga terkaya di Indonesia mewakili kurang dari seperseratus dari 1% penduduk, total kekayaan mereka menyumbang 25% produk domestikbruto (PDB) Indonesia. Rata-rata kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia tertinggi di kawasan itu dan gabungan kekayaan mereka setara dengan 10,2% PDB Indonesia (Winters, 2013). Selain itu, kerapuhan perekonomian Indonesia setelah dilanda krisis keuangan Asia dan transisi demokrasi berikutnya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia tidaklah rendah dan stabil sebagaimana dipersepsikan pada umumnya (Thee, 2002; UNSFIR, 2003; Dhanani, Islam, dan Chowdhury, 2009; Frankema dan Mark, 2009). Data jangka panjang (1971–2008) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari pendapatan (kurang dari 30%) terakumulasi untuk tenaga kerja, sementara sebagian besar merupakan bagian dari modal. Proporsinya tidak banyak berubah selama kurun waktu tersebut (Tadjoeddin, 2013b).

mempertemukan tiga hubungan koheren dari tiga variabel: ketimpangan, pendapatan, dan kekerasan. Pengaruh ketimpangan terhadap kekerasan jauh lebih kuat dan lebih konsisten daripada peran variabel yang termasuk dalam hipotesis kesempatan seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, dan demografi.

Kedua, pada aras makro, temuan ini memperlihatkan sifat (*nature*) kekerasan kolektif yang berubah di Indonesia dari dominasi kekerasan episodik (*episodic violence*) skala besar selama masa transisi ke dominasi kekerasan rutin (*routine violence*) skala kecil pasca-2005. *Ketiga*, terkait erat dengan temuan kedua, tentang karakteristik kekerasan etnis pasca-2005 yang memperlihatkan kemiripan dengan ciri kekerasan rutin. Hal tersebut berbeda dengan sifat episodik dari kekerasan etnis selama masa transisi demokrasi. Temuan ini didukung oleh fakta bahwa hubungan tiga arah antara ketimpangan vertikal, pendapatan, dan kekerasan tidak hanya ditemukan dalam kasus-kasus kekerasan rutin dan kejahatan dengan kekerasan, tetapi juga berlaku untuk kasus kekerasan etnis. Pergeseran dari kekerasan episodik ke kekerasan rutin dan sifat kekerasan etnis yang berubah menunjukkan adanya proses normalisasi kekerasan kolektif karena sebagian besar pengaruh guncangan transisi telah banyak menghilang sejak 2005, ketika negara mencapai titik ekuilibrium baru kontrak sosial dalam bentuk Indonesia yang demokratis dan terdesentralisasi (Tadjoeddin, 2014).

Sisa dari kertas kerja ini tersusun sebagai berikut. Bagian II membahas gagasan stabilitas masyarakat sebagai perhatian utama kami. Bagian III menelusuri literatur yang ada sebelumnya untuk menelusuri ketimpangan dalam proses pembangunan dan menggali potensi hubungannya dengan stabilitas masyarakat. Bagian IV memaparkan gambaran singkat mengenai ketimpangan dan konflik. Strategi estimasi empiris kami perinci dalam Bagian V, sedangkan hasil-hasilnya disajikan dalam Bagian VI. Kesimpulan singkat diberikan di Bagian akhir.

II. MENGAPA DAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN STABILITAS

Pentingnya stabilitas masyarakat bagi Indonesia yang memiliki keragaman etnis dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa tak dapat diabaikan begitu saja. Indonesia adalah negara demokrasi relatif muda dan terbesar ketiga di dunia. Setelah statusnya dinaikkan oleh Bank Dunia menjadi negara berpenghasilan menengah-bawah, belum lama ini posisi Indonesia ditingkatkan menjadi ekonomi terbesar ke-10 di dunia berdasarkan data paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) yang berlaku saat ini (*Jakarta Post*, 2014). Transisi Indonesia menuju demokrasi berlangsung di tengah-tengah kemunduran ekonomi yang serius setelah krisis keuangan Asia akhir 1990-an.

Namun, transisi tersebut dianggap oleh sebagian orang sebagai hal penuh risiko ketika beberapa penulis mengemukakan pendapat bahwa ada ambang pendapatan minimum yang membuat demokrasi bisa berhasil (Przeworski *et al.*, 2000; Zakaria, 2003). Walaupun demokrasi dipandang sebagai mekanisme nonkekerasan untuk menyelesaikan konflik, praktik demokrasi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah-bawah kerap kali menjadi kompleks dengan adanya kekerasan, bahkan perang saudara/sipil. Risiko konflik kekerasan semasa transisi demokratis di negara-negara berpenghasilan rendah telah dibuktikan dengan kuat dan didukung secara empiris (Hegre *et al.*, 2001; Snyder, 2000). Berdasarkan bukti anekdot, beberapa komentator berpengaruh juga menunjukkan bahwa demokratisasi di negara-negara berkembang membawa hasil ekonomi yang buruk, ketidakstabilan politik, dan konflik etnis (Kaplan, 2000; Chua, 2002; dan Zakaria, 2003).

Untuk sebagian besar, pengalaman Indonesia sangat sesuai dengan penilaian di atas ketika langkah maju negara menuju demokrasi kerap kali disertai letupan konflik kekerasan yang signifikan. Mengalirnya berbagai jenis kekerasan selama fase awal transisi bahkan membuat sejumlah pengamat menggambarkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi Balkan di Asia Tenggara, mengacu pada risiko disintegrasi yang dihadapi oleh negara bersangkutan (Booth, 1999; Cribb, 1999).

Konflik kekerasan atau kekerasan kolektif dan kelompok di Indonesia masa kini dapat dikategorikan secara umum ke dalam peristiwa-peristiwa episodik dan rutin (Tadjoeddin dan Murshed, 2007; Tadjoeddin 2014). Yang pertama terdiri dari kekerasan separatis dan etnis dan yang terakhir berpusat pada pertarungan kelompok dan main hakim sendiri. Kekerasan episodik biasanya dikaitkan dengan tingginya jumlah korban tewas dan relatif rendahnya jumlah insiden, sedangkan variasi kekerasan rutin ditandai pola sebaliknya. Antara 1990–2003, kekerasan etnis-komunal menyebabkan 89% dari total kematian (9.612 korban jiwa) dalam kasus-kasus kekerasan kolektif nonseparatis, tetapi hanya memberikan kontribusi 17% dari total insiden. Kekerasan rutin menyebabkan 11% kematian, tetapi berkontribusi 83% dari total insiden (Varshney, Tadjoeddin, dan Panggabean, 2008).

Kekerasan separatis hanya terbatas di Aceh, Papua, dan di Timor Timur sebelum meraih kemerdekaan resmi dari Indonesia. Kekerasan episodik memiliki dampak ekonomi sangat besar dan menelantarkan atau membuat banyak orang menjadi pengungsi,³ sementara kekerasan rutin cenderung menyebabkan kerusakan tidak berarti dan kecil kemungkinannya membuat banyak orang menjadi pengungsi. Menariknya, pada masa puncak transisi demokrasi, saat kekerasan rutin terjadi hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa, kekerasan episodik justru terkonsentrasi di beberapa daerah luar Jawa.

Transisi Indonesia menuju demokrasi ditandai oleh gelombang kekerasan separatis dan kekerasan etnis. Segera setelah jatuhnya Soeharto, generasi baru pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diperkuat oleh rekrutan baru yang dilatih di Libya, melancarkan tantangan baru terhadap kendali Pemerintah Indonesia terhadap Provinsi Aceh. Kisah serupa tentang tantangan separatis terus berlanjut dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua di ujung timur Indonesia. Tantangan baru pemisahan diri tidak hanya diartikulasikan secara militer (GAM di Aceh dan OPM di Papua); mereka juga dilengkapi dengan gerakan politik di kalangan organisasi masyarakat sipil sebagaimana ditunjukkan Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) di Aceh dan Presidium Dewan Papua (PDP) di Papua.

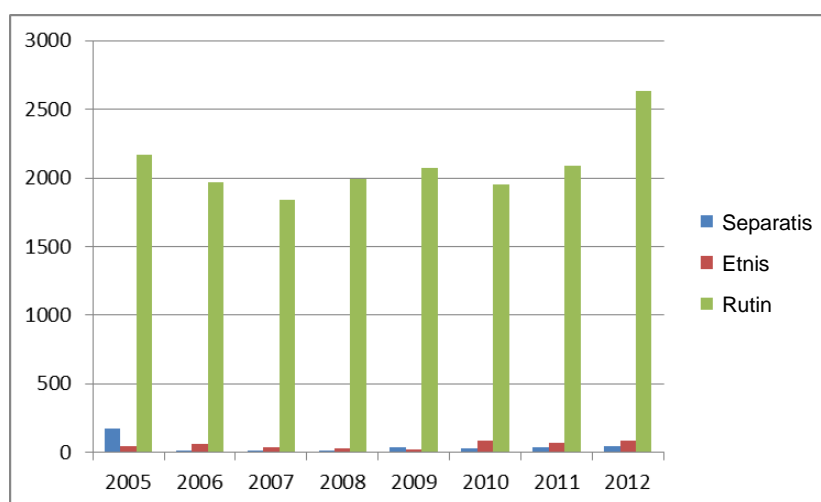
Gerakan politik separatis yang dilengkapi dengan sayap pemberontak terorganisasi jelas hadir di Aceh dan Papua, dan masing-masing dikategorikan ke dalam kelompok yang memiliki tingkat kekerasan separatis tinggi dan menengah. Perang sipil di Aceh diakhiri dengan Perjanjian Perdamaian Helsinki 2005 yang memberikan pemerintahan otonom untuk wilayah Aceh, sementara kekerasan separatis di Papua telah menurun secara signifikan sejak pemberian status otonomi khusus ke wilayah Papua pada 2001. Organisasi paramiliter GAM di Aceh telah berganti wujud menjadi beberapa partai politik lokal yang sekarang ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi lokal. Pemerintahan provinsi bahkan dijalankan oleh mantan pemberontak sejak 2007. Di Papua, elemen-elemen gerakan separatis juga banyak yang terserap dalam proses politik dan ekonomi lokal dalam selubung desentralisasi dan demokrasi lokal.

³Pada 2001, semasa puncak konflik kekerasan di Indonesia, dilaporkan bahwa insiden kekerasan membuat 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal (*internally displaced person/IDPs*) yang tersebar di 22 provinsi se-Indonesia (*The Jakarta Post*, 20 November 2001).

Kekerasan antaretnis merebak di Maluku, Poso, Sambas, Sampit, dan beberapa lokasi lain dengan pola konsentrasi daerah yang jelas dan terutama terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an semasa puncak reformasi demokrasi dan desentralisasi. Kekerasan etnis yang terjadi di antara kelompok-kelompok komunal terbelah menurut garis etnis. Mengikuti Horowitz (1985), “etnis” secara umum didefinisikan sebagai identitas kelompok askriptif (berdasarkan kelahiran); ras, bahasa, agama, suku, atau kasta dapat menjadi basis identitas etnis.

Penyusunan data kekerasan kolektif di Indonesia secara sistematis dipelopori United Nations Development Programme (UNDP) melalui United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR) (Tadjoeddin, 2002; Varshney, Tadjoeddin, dan Panggabean, 2008). Kemudian, Bank Dunia memperluas dan memperdalam pangkalan data (*database*) kekerasan kolektif UNSFIR melalui proyek VICIS (Barron *et al.*, 2009). Pangkalan data kekerasan kolektif Bank Dunia tersebut kemudian diadopsi ke dalam Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Indonesia.⁴ SNPK secara resmi berada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta memperoleh bantuan teknis dari The Habibie Center dan Bank Dunia. SNPK menghimpun data tentang insiden kekerasan kolektif dan konflik dengan kekerasan, serta kejahatan dengan kekerasan.

Jika melihat data tersebut, tampak jelas ada pergeseran dalam pola kekerasan kolektif dari kekerasan etnis dan separatis (seperti yang ditemukan pada masa puncak transisi demokrasi akhir 1990-an dan awal 2000-an) ke arah dominansi kekerasan rutin pada kurun waktu pasca transisi demokrasi. Gambar 1 dan Gambar 2 menyajikan kecenderungan agregat kekerasan kolektif sepanjang 2005–2012, periode setelah banyak episode kekerasan separatis dan kekerasan etnis selama puncak transisi telah diselesaikan.⁵ Data yang tersedia adalah untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai daerah “tinggi konflik” semasa puncak transisi demokrasi, termasuk Aceh, Lampung, Jakarta, dan beberapa kabupaten di Jawa Barat (Bogor, Depok, dan Bekasi), Banten (Tangerang), Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku (termasuk Maluku Utara) dan Papua (termasuk Papua Barat). Dari kedua ukuran tersebut, baik korban jiwa maupun insiden total, kekerasan rutin merupakan bentuk kekerasan kolektif paling dominan sejak 2005.

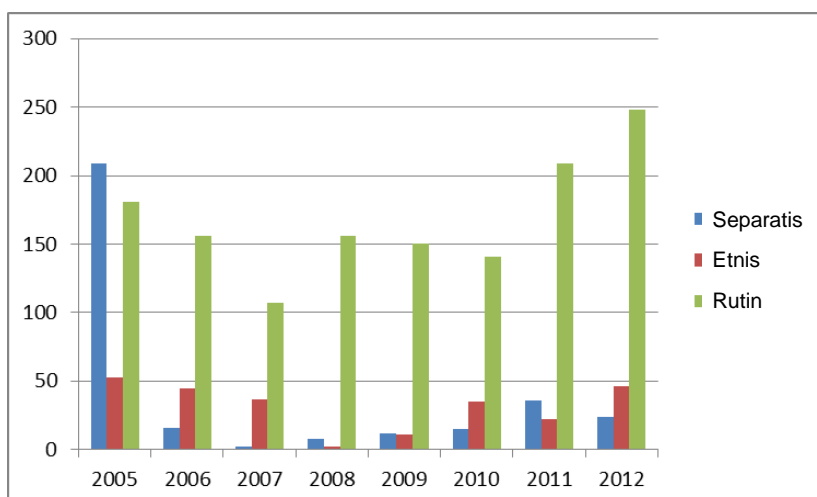


Gambar 1. Insiden kekerasan kolektif di daerah yang sebelumnya “tinggi konflik”, 2005–2012

Sumber: Dihitung dari data SNPK.

⁴Informasi lebih lanjut tentang pangkalan data dan isinya; lihat, www.sn timer-indonesia.com.

⁵Lihat, Varshney, Tadjoeddin, dan Panggabean (2008) untuk pola kekerasan kolektif selama transisi demokrasi di Indonesia.



Gambar 2. Korban tewas akibat kekerasan kolektif di daerah yang sebelumnya “tinggi konflik”, 2005–2012

Sumber: Dihitung dari data SNPK.

Sifat dari kekerasan rutin nonepisodik selama 2005–2012 dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2. Insiden kekerasan rutin dan terkait dengan korban tewas tersebar selama bertahun-tahun tanpa adanya pola konsentrasi regional yang jelas, yang berbeda dengan kekerasan separatis dan kekerasan etnis selama masa puncak transisi. Selain itu, bila diperhatikan lebih dekat, data agregat deret waktu (*time-series data*) tentang insiden dan kerusakan yang diakibatkan (korban tewas, cedera, dan bangunan rusak) menunjukkan meningkatnya tren kekerasan rutin dan kekerasan etnis dalam beberapa tahun terakhir, khususnya selama periode 2009–2012, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3 dan 4. Meningkatnya tren kekerasan etnis lebih terasa dan memang agak mengkhawatirkan. Namun, harus pula dicatat bahwa besaran kekerasan etnis jauh lebih rendah daripada kekerasan rutin, sebuah perbandingan yang diilustrasikan sebelumnya pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Korban Tewas dalam Kekerasan Rutin, 2005–2012

Daerah	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	4	2	2	14	6	6	14	11
Lampung	22	19	17	25	27	28	26	25
Jabodetabek*	78	72	30	47	32	41	58	78
Nusa Tenggara Barat	17	12	17	14	23	12	15	20
Nusa Tenggara Timur	19	14	10	9	12	10	21	18
Kalimantan Barat	3	3	2	2	7	7	5	3
Kalimantan Tengah	2	7	3	8	5	2	7	5
Sulawesi Tengah	10	8	7	2	2	11	7	11
Maluku	11	3	7	22	4	7	12	36
Papua	15	16	12	3	32	17	44	41
Total	181	156	107	156	150	141	209	248

Sumber: Dihitung dari data SNPK.

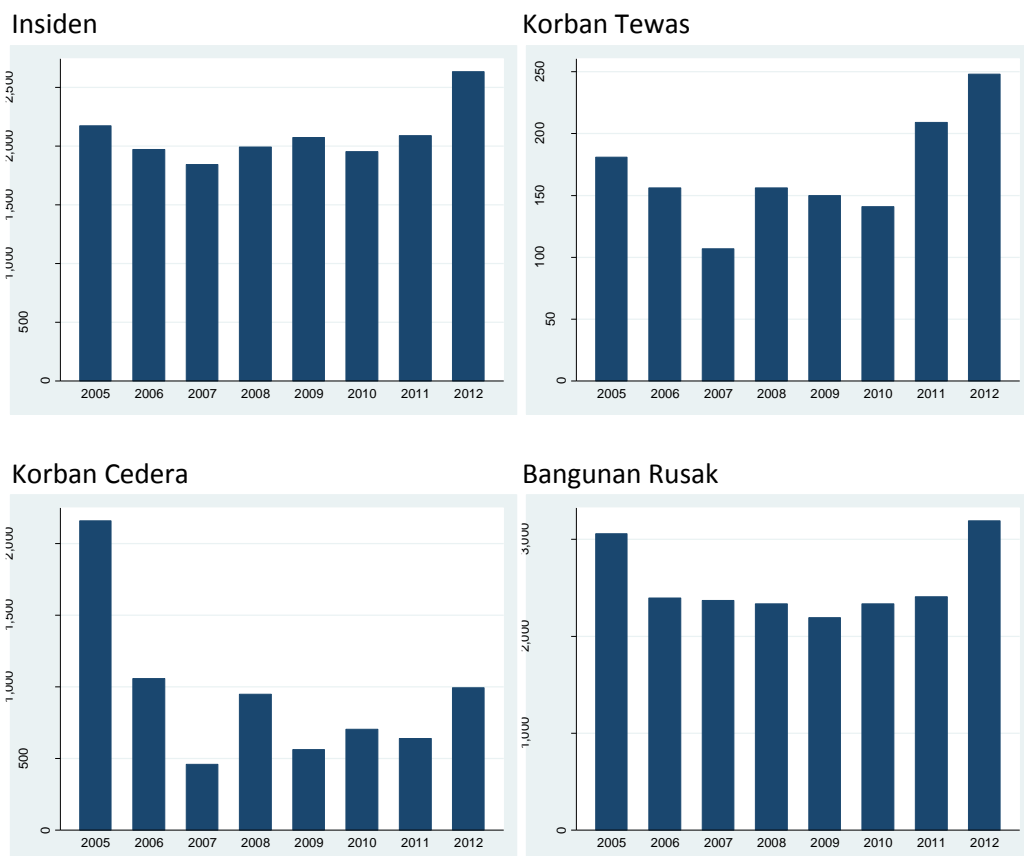
*Jabodetabek: Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang, dan Bekasi

Tabel 2. Insiden Kekerasan Rutin, 2005–2012

Daerah	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	30	87	148	227	278	212	216	392
Lampung	196	214	150	175	201	167	175	161
Jabodetabek*	939	763	627	492	568	487	631	716
Nusa Tenggara Barat	201	189	183	195	162	221	170	247
Nusa Tenggara Timur	140	109	100	132	111	116	127	134
Kalimantan Barat	239	227	193	166	201	135	91	95
Kalimantan Tengah	42	58	61	81	74	59	91	86
Sulawesi Tengah	83	96	98	90	69	98	113	146
Maluku	124	94	131	214	165	214	194	280
Papua	178	134	152	220	243	243	281	376
Total	2172	1971	1843	1992	2072	1952	2089	2633

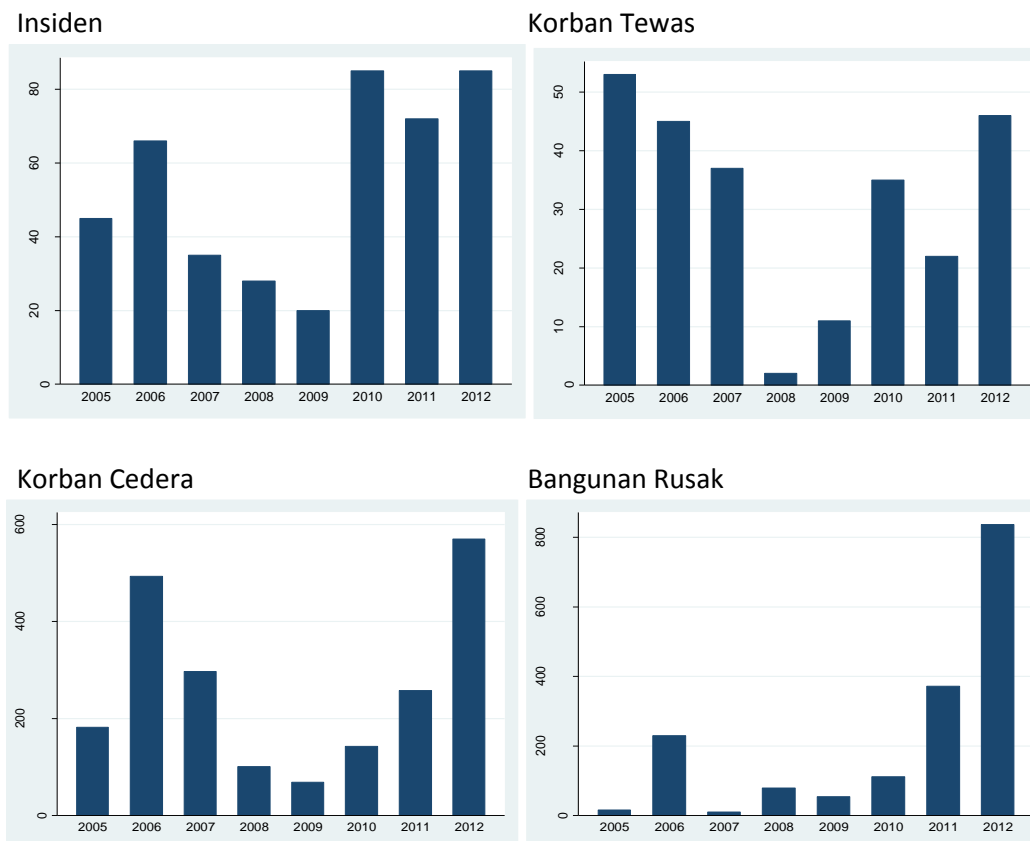
Sumber: Dihitung dari data SNPK.

*Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi



Gambar 3. Kekerasan rutin: insiden dan kerusakan yang ditimbulkan, 2005–2012

Sumber: Dihitung dari data SNPK.



Gambar 4. Kekerasan etnis: insiden dan kerusakan yang ditimbulkan, 2005–2012

Sumber: Dihitung dari data SNPK.

Stabilitas masyarakat dapat dipahami sebagai keselarasan dalam relasi masyarakat. Namun, hal ini adalah sebuah hasil abstrak yang diinginkan yang tidak dapat dengan mudah diterangkan oleh satu indikator saja, apalagi langsung diukur. Demi kepraktisan, akan lebih mudah memusatkan perhatian pada variabel-variabel yang dapat membahayakan stabilitas sosial. Dalam hal ini, ada dua variabel penting: konflik dengan kekerasan dan kejahatan dengan kekerasan. Untuk konflik dengan kekerasan, kajian ini memusatkan perhatian pada kekerasan rutin selama 2005–2012 di beberapa daerah yang sebelumnya dianggap sebagai provinsi “tinggi konflik” disebabkan oleh perubahan pola kekerasan kolektif di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

III. KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN

Ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat pada dasarnya merupakan hasil sampingan proses pembangunan. Oleh karena itu, ketimpangan telah sekian lama dianggap sebagai fenomena alamiah. Menekan tingkat kesenjangan menjadi nol adalah sebuah cita-cita utopis dan terbukti menjadi eksperimen yang gagal total, seperti terlihat jelas dalam perekonomian di Tiongkok komunis dan bekas Uni Soviet. Tantangannya terletak pada bagaimana mengawasi tingkat kesenjangan dan mempertahankannya pada tingkat yang dapat ditoleransi.

Ada daftar panjang literatur tentang ketimpangan dalam pembangunan. Albert Hirschman, Arthur Lewis, dan Simon Kuznets termasuk di antara para ahli yang memelopori kajian tentang

ketimpangan (Hirschman, 1973; Lewis, 1976; Kuznets, 1955). Lewis menekankan bahwa ketimpangan tak terelakkan dalam proses pembangunan, dan terkenal dengan pendapatnya bahwa pembangunan harus bersifat tidak egaliter karena “tidak dimulai pada setiap bagian perekonomian pada saat yang sama”⁶ (1976: 26).

Jauh lebih awal dari itu, Kuznets (1955) berpendapat bahwa *trade-off* pasti terjadi antara pendapatan dan ketimpangan pada tahap awal pembangunan sebelum sebuah perekonomian pada akhirnya mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan bisa mengurangi ketimpangan. Analisis Kuznets tentang evolusi ketimpangan—berbentuk “U terbalik” terhadap tingkat pendapatan—didasarkan pada transisi sektoral para pekerja dari sektor pertanian (tradisional) ke sektor industri (modern). Proses itu menyiratkan bahwa: (i) lonjakan ketimpangan bersifat sementara dan pada akhirnya akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan; (ii) ketimpangan lebih tinggi di bagian tengah kurva U terbalik mewakili periode transisi dari sektor pertanian ke industri didorong oleh perbedaan pendapatan antara sektor pertanian dan industri; (iii) tingkat ketimpangan di sektor pertanian maupun industri lebih rendah daripada seluruh ketimpangan bila kedua sektor itu digabungkan.

Konsep toleransi ketimpangan ekonomi yang diperkenalkan Hirschman (1973) memperluas diskusi mengenai ketimpangan dalam pembangunan dengan memasukkan unsur stabilitas masyarakat. Jika batas toleransi itu dilampaui, harapan akan berubah menjadi keluhan. Hirschman (1973) menjelaskan gagasan toleransi terhadap ketimpangan ekonomi lewat gagasan “efek terowongan” (*tunnel effect*). Ilustrasi mengenai terowongan berasal dari penjelasan Hirschman yang menganalogikannya dengan kemacetan lalu lintas di dalam terowongan dua jalur yang dipisahkan oleh pembatas jalan. Jalan di dalam terowongan macet pada satu jalur. Bergeraknya kendaraan di jalur kedua memunculkan harapan bahwa jalan di jalur pertama juga akan lancar. Akhirnya, beberapa pengemudi berusaha secara ilegal menyeberang ke jalur yang lancar. Dalam ilustrasi itu, “batas toleransi” adalah jangka waktu maksimum seberapa lama pengemudi di jalur pertama tetap sabar sebelum mereka mulai menyeberang secara ilegal ke jalur yang lebih lancar.

Hirschman mengidentifikasi sebuah mekanisme sosial yang mengandung rasa terdeprivasi relatif atau iri yang muncul karena peningkatan ketimpangan. Seiring dengan kemajuan pembangunan, keberuntungan beberapa orang akan membaik dan yang lain tertinggal di belakang, dan dengan demikian ketimpangan akan meningkat. Situasi ini bukannya memicu kemarahan, tetapi sebaliknya malah menumbuhkan harapan masyarakat yang tertinggal. Ketimpangan yang lebih tinggi menunjukkan adanya peningkatan kemajuan sosial dan ekonomi yang dapat ditafsirkan sebagai sumber harapan bahkan bagi mereka yang tidak langsung mendapatkan manfaat pembangunan. Namun, harapan akan digantikan oleh keluhan jika toleransi telah mencapai ambang batas, dan keluhan semacam itu dapat membahayakan stabilitas sosial.

Ketimpangan terkait dengan isu-isu ekonomi, politik, dan sosial. Ketimpangan yang meningkat menantang pemikiran ekonomi arus utama tentang kemajuan pertumbuhan ekonomi melalui efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*). Tingginya tingkat ketimpangan dapat menjadi penghalang serius bagi pertumbuhan ekonomi masa depan dan menjadi penyebab potensial keterbelakangan (Berg, Ostry, dan Zettelmeyer, 2012; Easterly, 2007). Upaya penanggulangan kemiskinan dilemahkan oleh meningkatnya ketimpangan (Ravallion, 2011). Ketimpangan juga ditemukan berkorelasi positif dengan defisit transaksi berjalan dan utang rumah tangga (Goda, 2013; Kumhof dan Ranci re, 2010; UNCTAD, 2012); keduanya merupakan sumber ketidakstabilan makroekonomi. Meningkatnya ketimpangan akan merongrong demokrasi (Stiglitz, 2012) dan merupakan sumber utama dari sekian banyak penyakit sosial (Wilkinson dan Pickett, 2009). Lebih penting lagi, dan terkait dengan fokus kajian ini, meningkatnya ketimpangan juga dikaitkan dengan konflik yang disertai kekerasan. Itulah isu yang akan dibahas di bawah ini.

⁶Kalimat asli: “it does not start in every part of the economy at the same time”.

IV. KETIMPANGAN DAN KONFLIK

Salah satu dimensi penting dalam analisis mengenai konflik yang disertai kekerasan adalah distribusi hasil ekonomi yang dirasakan dan benar terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan memang penting. Ada dua jenis ketimpangan, yakni ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal. Ketimpangan vertikal mengacu pada ketimpangan antarpenduduk pada umumnya dan biasanya diukur dengan koefisien Gini.⁷ Ketimpangan horizontal mengacu pada ketimpangan antara kelompok-kelompok atau wilayah etno-sosial yang berbeda. Hal tersebut dapat diukur hanya dengan rasio rata-rata atau rata-rata pendapatan dua kelompok (atau wilayah). Hal itu juga dapat diukur dengan besar relatif total pendapatan kelompok-kelompok (atau wilayah-wilayah) yang berbeda, yaitu dengan pendapatan nasional bruto atau koefisien Gini mereka. Selain itu, ketimpangan horizontal dapat diukur dengan metrik yang serupa dengan koefisien variasi. Jadi, ketimpangan horizontal menunjukkan kesejahteraan relatif kelompok/wilayah sosial-ekonomi atau etno-agama yang berbeda. Ketimpangan horizontal menghasilkan semacam rasa deprivasi relatif satu kelompok, sedangkan ketimpangan vertikal menyebabkan rasa deprivasi individu di kalangan kelompok-kelompok miskin dan menengah-bawah.

Tautan antara ketimpangan dan konflik sudah lama menjadi perhatian. Banyak teoretikus menunjukkan bahwa ketimpangan menghasilkan konflik, misalnya Gurr (1970), Huntington (1968), dan Russett (1964).⁸ Cramer (2005: 1) berpendapat, “hampir merupakan asumsi universal bahwa distribusi sumber daya dan kekayaan yang tidak adil akan memancing pemberontakan dengan kekerasan.” Kanbur (2007: 5) menyatakan bahwa “tampaknya secara umum diterima bahwa kemiskinan dan ketimpangan akan mengembangbiakkan konflik.” Secara umum, ketimpangan menciptakan rasa ketidakadilan yang merupakan inti dari kemarahan di balik setiap jenis konflik dengan kekerasan. Nafziger, Wayne, dan Auvinen (2002) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan yang besar akan memperparah kerentanan penduduk terhadap kondisi darurat kemanusiaan.

Muller (1997: 137) berpendapat bahwa “tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi akan meradikalisasi kelas pekerja, mempertajam polarisasi kelas, dan mengurangi toleransi kaum borjuis terhadap partisipasi politik kelas-kelas bawah.” Dalam sebuah studi lintas negara, dia menunjukkan korelasi positif antara ketimpangan pendapatan dan variabel biner stabilitas dan ketidakstabilan demokrasi antara 1960 dan 1980. Kajian-kajian tersebut mendukung karya Alesina dan Perotti (1996) yang menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berkaitan dengan ketidakpuasan sosial dan ketidakstabilan politik, yang pada gilirannya memiliki korelasi dengan rendahnya investasi.

Namun, dua studi empiris lintas negara yang paling banyak dikutip mengenai perang sipil, yakni oleh Fearon dan Laitin (2003) serta Collier dan Hoeffler (2004), sebagian besar menafikan peran ketimpangan dalam konflik. Dari perspektif ilmu politik, Fearon dan Laitin menyiratkan bahwa ketimpangan tidak menjadi masalah karena kapasitas negara, mengacu pada kekuatan supresif negara. Pandangan yang dikemukakan Collier dan Hoeffler lebih mirip dengan pandangan mengenai bandit atau panglima perang tidak resmi (*warlordism*). Bagi mereka, akar penyebab

⁷Ukuran lain yang banyak digunakan adalah rasio dispersi desil yang menyajikan rasio konsumsi rata-rata atau pendapatan penduduk 10% terkaya dibagi dengan pendapatan rata-rata penduduk 10% terbawah. Hal itu menunjukkan bagaimana desil terbawah penduduk (dalam hal pendapatan) relatif terhadap desil teratas.

⁸Sejak zaman Aristoteles, filsuf sosial telah berspekulasi bahwa ketimpangan ekonomi adalah penyebab mendasar kekerasan politik dan revolusi. De Tocqueville ([1835] 1961: 302) mengemukakan hipotesis klasik secara ringkas: “Hampir semua revolusi yang mengubah aspek bangsa dilakukan untuk mengonsolidasi atau menghancurkan ketimpangan sosial. Hapus penyebab sekunder yang menghasilkan guncangan besar dunia, dan Anda akan hampir selalu menemukan asas ketimpangan di bagian dasarnya.”

konflik bukan patologi sosial seperti ketimpangan, melainkan patologi individual seperti keserakahan. Mereka juga mengenyampingkan isu tindakan kolektif, sebagaimana dibahas dalam Olson (1965), karena ilmuwan politik dari segi analisis terlalu sering dibutakan oleh konsep kekuasaan, sedangkan para ekonom neo-klasik terutama menaruh perhatian pada motivasi yang mementingkan diri sendiri.

Karena kajian-kajian tersebut (Fearon dan Laitin, 2003; Collier dan Hoeffler, 2004) menggunakan indeks Gini dari ketimpangan vertikal pendapatan yang mengukur ketimpangan antarindividu di suatu negara, perbedaan antara ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal—yang memberi fokus pada ketimpangan antarkelompok—menjadi penting. Dalam kaitan itu, Stewart (2000, 2008) berpendapat bahwa ketimpangan horizontal yang penting bagi munculnya konflik. Ketimpangan kelompok horizontal membantu membangun solidaritas kelompok dan pada gilirannya membangun dasar untuk tindakan kolektif. Stewart menyajikan beberapa studi kasus untuk menopang argumentasinya. Mengikuti kajian Stewart, penekanan pada ketimpangan horizontal juga memperoleh dukungan empiris dari studi lintas negara baru-baru ini mengenai perang sipil (Cederman, Gleditsch, dan Buhaug, 2013; Østby, 2008) serta konflik etnis lintas kabupaten di Indonesia (Mancini, Stewart, dan Brown, 2008).

Ketimpangan horizontal di antara berbagai kelompok etnis dan regional memainkan peran signifikan dalam konflik etnis dan separatis di Indonesia (Tadjoeddin, 2011; 2013a). Berbeda dengan Stewart (2000; 2008), Tadjoeddin berpendapat bahwa bukan perluasan ketimpangan horizontal yang menjadi masalah penting, tetapi bahwa konvergensi kemajuan sosial-ekonomi antarwilayah dan antara kelompok-kelompok etnis yang dicapai selama pemerintahan otoriter Orde Baru Soeharto telah menimbulkan rasa deprivasi relatif di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya lebih kaya dan lebih berpengaruh.

Konflik antaretnis yang muncul dari penyempitan ketimpangan horizontal atau konvergensi kesenjangan di antara dua kelompok etnis yang saling bersaing bukanlah hal yang hanya ditemui di Indonesia. Hal itu juga terjadi di India, negara di mana penduduk beragama Hindu secara tradisional merupakan kelompok yang memiliki hak istimewa dan Muslim menjadi kelompok yang relatif kurang diuntungkan. Mitra dan Ray (2013) menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan umat Islam, yang diukur oleh pengeluaran per kapita, mengarah pada peningkatan kekerasan Hindu-Muslim di masa depan, sedangkan peningkatan kesejahteraan di kalangan penduduk beragama Hindu tidak berpengaruh signifikan pada konflik di masa depan. Mereka menafsirkan hal itu sebagai akibat dari sikap masyarakat Hindu yang bertindak sebagai agresor melawan kelompok terpinggirkan (Muslim) yang berusaha mengejar ketertinggalan.

Dalam hal konvergensi, kita dapat melihat bahwa kelompok-kelompok yang secara tradisional memiliki privilese dapat bertindak sebagai penyerang. Di sisi lain, dalam hal divergensi, kelompok yang terpinggirkan akan menjadi agresor, seperti dalam kasus kerusuhan rasial di Malaysia pada 1969 ketika orang-orang Melayu miskin dan terpinggirkan menyerang orang-orang Cina kaya. Mereka yang terpinggirkan juga bisa menjadi penyerang/agresor dalam kasus ketimpangan vertikal.

Untaian penelitian lainnya mengaitkan peran ketimpangan vertikal dalam konflik terkait gerakan demokratisasi. Sebagai contoh, Acemoglu dan Robinson (2006) meyakini bahwa tuntutan demokrasi sebagian didorong oleh aspirasi mengenai redistribusi. Dalam kebanyakan kasus, gerakan demokratisasi pada fase-fase awal melibatkan aksi kekerasan yang ditujukan terhadap rezim otoriter. Kekerasan tersebut tidak hanya melibatkan warga negara dan aparat keamanan, melainkan juga mereka yang diuntungkan oleh sistem (kaum elite dan pengawal pribadi mereka) dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk sama sekali mengabaikan peran ketimpangan vertikal dalam konflik dan semata-mata terfokus pada ketimpangan horizontal, sebagaimana kecenderungan perkembangan penelitian mutakhir, misalnya, Stewart (2008) dan Østby *et al.* (2011). Kedua jenis ketimpangan tersebut menghasilkan rasa frustrasi yang mendasar dalam membangkitkan amarah di kalangan masyarakat umum dan kelompok-kelompok sosial-ekonomi dan etnis-keagamaan. Para pakar berpendapat bahwa temuan-temuan yang bertentangan dengan hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan jenis konflik yang dimaksud. Walaupun studi-studi tersebut tidak mempertimbangkan ketimpangan vertikal yang mengarah ke konflik dengan kekerasan tingkat tinggi seperti perang saudara dan konflik etnis, studi baru-baru ini oleh Tadjoeeddin *et al.* (2012) menemukan bahwa ketimpangan vertikal memiliki efek yang meningkatkan kekerasan dalam kasus kekerasan rutin tingkat rendah di Pulau Jawa yang padat penduduk dan secara etnis agak homogen. Dalam hal kekerasan rutin, rasa terdeprivasi secara umum di kalangan penduduk disebabkan oleh tingginya ketimpangan pendapatan dan aset mungkin memainkan peran signifikan. Kekerasan rutin dalam satu sisi adalah manifestasi dari rasa frustrasi dan dapat dipandang sebagai sebuah kompetisi di antara kelas sosial-ekonomi lapisan bawah karena tidak adanya perang kelas.

Studi terbaru tentang kekerasan kolektif di Indonesia masa kini barangkali bisa membantu mengklarifikasi berbagai peran kedua jenis ketimpangan (horizontal dan vertikal) di dalam dua klasifikasi kekerasan kolektif yang lebih luas, yaitu episodik dan rutin. Berdasarkan sifat kekerasan kolektif yang berubah-ubah di Indonesia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pemeriksaan empiris kami akan terfokus pada kekerasan rutin sebagai jenis kekerasan kolektif paling dominan sejak 2005. Selain itu, kami juga memeriksa kekerasan etnis karena kekerasan jenis ini menunjukkan tren peningkatan, meski besarnya jauh lebih kecil dibanding kekerasan rutin. Hal lain yang perlu diperhatikan, karakteristik kekerasan etnis pasca-2005 menunjukkan kemiripan dengan ciri kekerasan rutin.

V. STRATEGI ESTIMASI EMPIRIS

Kajian ini merupakan pengujian empiris mengenai tautan antara ketimpangan dan stabilitas masyarakat. Stabilitas diukur oleh dua variabel: kekerasan kolektif dan tindak kriminal dengan kekerasan. Data kekerasan kolektif diambil dari set data SNPK.⁹ Selain tentang kekerasan kolektif, SNPK juga menghimpun statistik mengenai tindak kriminal dengan kekerasan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembentukan SNPK berawal dari upaya Bank Dunia yang hendak memperdalam dan memperluas pangkalan data kekerasan kolektif yang sebelumnya dihimpun oleh UNSFIR. Dalam membangun pangkalan data, SNPK mengumpulkan pelbagai informasi dari surat kabar lokal dilengkapi dengan laporan beberapa organisasi nonpemerintah (ornop) dan sumber tepercaya lainnya. Setiap entri menyediakan informasi tentang tanggal, lokasi, dan dampak insiden; klasifikasi jenis, bentuk, dan pemicu kekerasan; afiliasi aktor yang terlibat dalam insiden, dan intervensi pihak berwenang. SNPK adalah upaya yang terus berlanjut tanpa henti. Data SNPK diambil dari tahun 1997, tetapi wilayah cakupannya cukup bervariasi (lihat, Tabel 3).

⁹Lihat, Barron, Jaffrey, dan Varshney (2014) untuk pembahasan perinci tentang set data SNPK dan bagaimana data itu disusun.

Tabel 3. Wilayah Cakupan SNPK

Daerah	Tahun		
	1997–2004	2005–2011	2012–2013
Aceh	v	v	v
Lampung	-	v	v
Jabodetabek ^a	-	v	v
Nusa Tenggara Barat	-	v	v
Nusa Tenggara Timur	v	v	v
Kalimantan Barat	v	v	n
Kalimantan Tengah	v	v	v
Kalimantan Timur	-	-	v
Sulawesi Tengah	v	v	v
Maluku	v	v	v
Maluku Utara	v	v	v
Papua	v	v	v
Papua Barat	v	v	v

Sumber: SNPK.

^aJabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Untuk konsistensi, mengingat wilayah cakupan SNPK, kajian ini memfokus pada periode 2005–2012 dengan wilayah sebagai berikut: (i) Aceh, (ii) Lampung, (iii) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), (iv) Nusa Tenggara Barat, (v) Nusa Tenggara Timur, (vi) Kalimantan Barat, (vii) Kalimantan Tengah, (viii) Sulawesi Tengah, (ix) Maluku, (x) Maluku Utara, (xi) Papua, dan (xii) Papua Barat. Kami menggunakan data tingkat kabupaten untuk menelusuri pola hingga tahun 2000—sebelum dimulainya kebijakan desentralisasi—yang membuat kami harus menggabungkan semua kabupaten baru dengan kabupaten induk masing-masing pada 2000. Karena itu, kami memiliki observasi data panel dalam bentuk kabupaten-tahun (*district-year*).

Periode 2005–2012 dipilih untuk mencapai cakupan yang konsisten bila menggunakan data SNPK dan juga mewakili kurun waktu ketika kekerasan episodik yang tampak di puncak transisi demokrasi sedikit banyak telah mereda. Pada 2005, gambaran makro tentang desentralisasi di Indonesia telah mencapai bentuk cukup stabil. Undang-undang tentang desentralisasi yang awalnya diperkenalkan pada 1999 (mulai diberlakukan pada 2001) kemudian direvisi pada 2004. Perbaikan aturan perundangan tersebut mencakup penerapan pemilihan langsung kepala pemerintahan daerah dan pengaturan otonomi khusus diterapkan di Provinsi Aceh dan Papua yang sebelumnya dilanda penuh pergolakan.

Kekerasan etnis di beberapa daerah luar Pulau Jawa, termasuk Maluku, Sambas, Sampit, dan Poso selama puncak reformasi desentralisasi diberi label oleh Gerry van Klinken (2007) sebagai perang komunal, sedangkan insiden kekerasan etnis yang lebih sporadis setelah 2005 agak berbeda. Yang pertama mencerminkan ketidakpastian selama reformasi demokrasi dan desentralisasi, sedangkan yang terakhir (kekerasan etnis pasca-2005) lebih terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari sisa-sisa karakteristik demokrasi Indonesia yang *illiberal* karena ketidaktuntasan reformasi (Wilson, 2015).

Variabel perhatian utama kami adalah kekerasan kolektif atau kejahatan dengan kekerasan sebagai ukuran inversi dari stabilitas masyarakat yang diperlakukan sebagai variabel terikat (*dependent*

variables) dan ketimpangan sebagai variabel bebas (*independent variables*). Hubungan tersebut ditulis sebagai berikut:

$$VIO_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 INEQ_{it} + \alpha_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

VIO merupakan ukuran inversi stabilitas masyarakat yang mencakup kekerasan rutin, kekerasan etnis, dan tindak kriminal dengan kekerasan. Kekerasan rutin dan kekerasan etnis mencakup insiden dan korban jiwa, sedangkan untuk kejahatan dengan kekerasan kami hanya memasukkan jumlah insiden. *INEQ* adalah variabel ketimpangan. Kami menilik kedua jenis ketimpangan, yakni vertikal dan horizontal. Ketimpangan vertikal relevan untuk kekerasan rutin dan tindak kriminal dengan kekerasan, sedangkan ketimpangan horizontal lebih cocok untuk menjelaskan kekerasan etnis. Indeks Gini pengeluaran konsumsi, berdasarkan data Susenas, digunakan untuk mengukur ketimpangan vertikal, sedangkan Gini Kelompok (GGINI) dan koefisien variasi kelompok tertimbang (wGCOV) dari lamanya bersekolah (pendidikan) di seluruh kelompok etnis dan agama (berdasarkan sensus penduduk setiap sepuluh tahun) digunakan sebagai ukuran ketimpangan horizontal.¹⁰

Untuk variabel bebas, selain variabel *INEQ*, kami memasukkan vektor *X*, yang mewakili serangkaian potensi penentu kekerasan sebagai alat kontrol. Vektor tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, pendapatan (produk domestik regional bruto [PDRB] per kapita), tingkat kemiskinan (persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan), pendidikan (lama sekolah/*years of schooling*), kaum muda (proporsi penduduk muda usia 15–24 tahun), perkotaan (bagian kelurahan [*urban village*] di sebuah kabupaten), fraksionalisasi etnis/agama, dan jumlah penduduk.

Dimasukkannya sebagian besar variabel bebas didasarkan pada peluang/kelayakan hipotesis tentang kekerasan (Collier, Hoeffler, dan Rohner, 2009). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan situasi ekonomi akhir dan saat ini yang mencerminkan harapan kenaikan tingkat pendapatan yang terus berlanjut dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pertumbuhan harus dikaitkan secara negatif dengan kekerasan (Tadjoeddin dan Murshed, 2007). Tingkat pendapatan mencerminkan tingkat pembangunan keseluruhan. Pertumbuhan maupun pendapatan yang lebih rendah menunjukkan biaya kesempatan (*opportunity cost*) lebih rendah untuk terlibat dalam kekerasan. Terdapat sebuah konsensus bahwa PDB per kapita adalah penerka paling tegar bagi risiko perang saudara dan ini hampir selalu disertakan dalam setiap regresi konflik lintas negara (Hegre dan Sambanis, 2006; Ross, 2004). Fearon dan Laitin (2003) yang menggunakan PDB per kapita sebagai ukuran (*proxy*) kekuatan negara berargumen bahwa kelemahan negara, seperti kapasitas terbatas dalam pengawasan hukum dan infrastruktur yang buruk, memberi kesempatan kepada kaum pemberontak untuk meneruskan pemberontakan.

Logika kemiskinan sebagai faktor penentu kekerasan juga bertaut erat dengan hipotesis peluang (*the opportunity hypothesis*). Namun, berbeda dengan pendapatan rata-rata yang lebih rendah, ukuran kemiskinan melihat ukuran relatif penduduk yang hidup di bawah ambang pendapatan tertentu. Kemiskinan ditemukan berkorelasi positif dengan kekerasan rutin di seluruh kabupaten di Jawa selama 1993–2003 (Tadjoeddin dan Murshed, 2007) dan kekerasan dalam pemilu lokal di seluruh kabupaten di Indonesia selama 2005–2007 (Tadjoedin, 2011). Pendidikan adalah variabel lain untuk mengukur tingkat pembangunan; tingkat pendidikan lebih rendah dikaitkan dengan biaya kesempatan lebih kecil untuk terlibat dalam kekerasan (Østby dan Urdal, 2010).

Kami juga menyertakan beberapa variabel demografis. Proporsi orang muda berusia antara 15 dan 24 tahun, yang dikenal sebagai pembengkakan kaum muda, adalah variabel kontrol lainnya karena sebagian besar peserta yang terlibat dalam insiden kekerasan adalah pemuda (Urdal, 2006, 2008).

¹⁰Lihat, Mancini, Stewart, dan Brown (2008) untuk perincian rumus GGINI dan wGCOV.

Kami juga memasukkan variabel perkotaan yang mengacu pada proporsi desa urban/kelurahan di sebuah kabupaten yang diklasifikasikan sebagai daerah perkotaan. Makin tinggi proporsi desa urban/kelurahan di suatu kabupaten menyiratkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Hal itu menunjukkan tekanan populasi, hal yang membuat kekerasan lebih mungkin terjadi (Ostby *et al.*, 2011; Urdal, 2012). Selanjutnya, fraksionalisasi etnis dan agama adalah variabel kontrol yang memasukkan sejumlah keluhan/amarah berdasarkan kerangka identitas (Esteban, Mayoral, dan Ray, 2012). Variabel terakhir adalah jumlah penduduk, yang semata-mata berfungsi sebagai variabel kontrol. Kami tidak mengubah variabel terikat, baik insiden ataupun korban jiwa, menjadi insiden atau kematian per penduduk untuk mempertahankan sifat asli variabel terikat kami sebagai data yang terhitung (*count data*). Hal tersebut memungkinkan kami untuk secara konsisten menggunakan regresi data cacahan (*count data regression*), yaitu binomial negatif (*negative binomial*), untuk menaksir model bersangkutan.¹¹

Data tentang ketimpangan vertikal (indeks Gini pengeluaran konsumsi), lamanya bersekolah, dan proporsi orang muda dihitung dari Susenas. Pertumbuhan dan PDRB per kapita diperoleh dari Neraca Pendapatan Daerah 2010. Data tentang ketimpangan horizontal dan fraksionalisasi dihitung dari data sensus penduduk. Semua data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

VI. HASIL

Bagian ini memerinci hasil kami yang disajikan sesuai urutan variabel terikat (kekerasan rutin, kekerasan etnis, dan tindak kriminal dengan kekerasan). Uji ketegaran (*robustness*) diberikan di bagian akhir bab ini.

6.1 Kekerasan Rutin

Kami mulai dengan kekerasan rutin, jenis kekerasan kolektif yang dominan sejak 2005. Ketimpangan vertikal ditemukan memiliki korelasi positif dengan insiden kekerasan rutin (lihat, Tabel 4, Kolom 3 dan 4). Besaran variabel Gini yang secara statistik signifikan dan cukup besar diperoleh setelah memperlakukan ketimpangan bersifat endogen terhadap tingkat pendapatan, mengikuti hubungan kurva Kuznets berbentuk lonceng antara ketimpangan dan pendapatan (Kuznets, 1955). Hubungan jenis kurva Kuznets antara ketimpangan dan pendapatan di Indonesia juga dipertegas oleh sebuah studi panel lintas kabupaten baru-baru ini (Tadjoeddin, 2013c).

Koefisien pendapatan yang positif dan sangat signifikan dalam Kolom (1) dan (2) bertentangan dengan perkiraan awal kami karena kajian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan merupakan prediktor konflik yang paling tegar (Hegre dan Sambanis, 2006). Kami memeriksa hubungan kuadratik (kurva berbentuk lonceng) antara kekerasan dan pendapatan serta menemukan bahwa hubungan kuadratik amat sangat signifikan. Hal itu untuk mencocokkan pandangan yang berseberangan mengenai hubungan linier dan nonlinier antara kekerasan dan pendapatan, sebagaimana diuraikan dalam Tadjoeddin dan Murshed (2007). Meningkatnya kemakmuran bisa mendorong perilaku pemangsa (*predatory behavior*) dalam bentuk kekerasan privat (serupa

¹¹Model dasar untuk memperkirakan data cacahan adalah model regresi Poisson untuk peristiwa langka. Namun, model Poisson biasanya mengidap masalah dispersi lebih besar (*overdispersi/overdispersion*). Dalam kasus ini, alternatif yang populer adalah regresi binomial negatif. Lihat, Cameron dan Trivedi (1998) untuk perincian lebih lanjut tentang regresi data cacahan yang lazim dalam beberapa jenis penelitian empiris tertentu, seperti kriminologi.

dengan konsep kekerasan rutin) yang muncul dari sejumlah keluhan di antara mereka yang kurang beruntung atau keserakahan mereka yang lebih beruntung. Tatkala pertumbuhan mengalami kemajuan lebih jauh, kekerasan harus merosot untuk menjaga jaminan investasi, dan negara harus menjalankan fungsi pengaturan. Jika kemakmuran semua orang terangkat ke tingkat tertentu, rasa iri dan kerentanan terhadap kekerasan rutin di antara mereka akan berkurang.

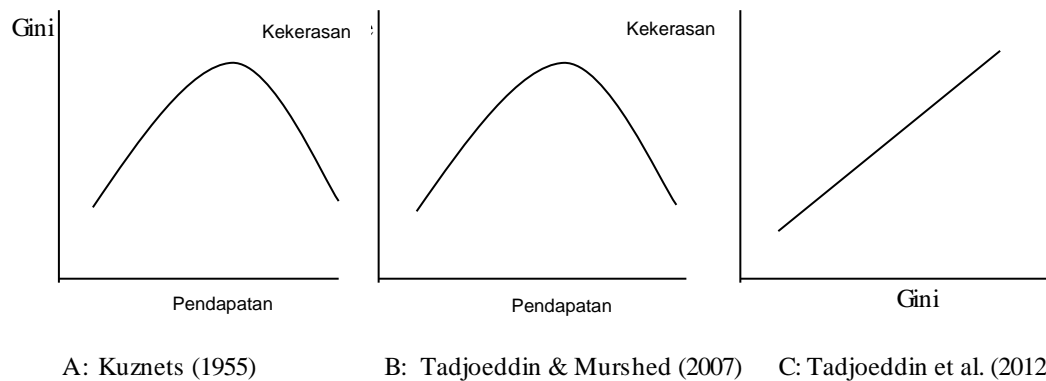
Dua temuan utama ini, efek meningkatnya kekerasan akibat ketimpangan serta hubungan berbentuk lonceng antara kekerasan dan pendapatan, diperoleh setelah mengendalikan efek tetap provinsi dan waktu (*province and time-fixed effects*), fraksionalisasi etnis dan agama, dan serangkaian variabel dugaan yang biasa ditemukan memberi kontribusi pada kekerasan dalam hipotesis peluang. Hubungan tiga arah di antara tiga variabel—ketimpangan (Gini), pendapatan, dan kekerasan rutin—dirangkum dalam Gambar 5. Hasil tersebut menegaskan kembali temuan kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Tadjoeeddin dan Murshed (2007) serta Tadjoeeddin, Chowdhury, dan Murshed (2012) tentang kekerasan rutin lintas kabupaten di Pulau Jawa selama tahun 1993–2003.

Dibandingkan dengan dua studi sebelumnya yang terfokus pada kabupaten-kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta terutama mencakup periode transisi demokrasi, studi ini membuat beberapa perbaikan. *Pertama*, unit analisisnya lintas kabupaten di wilayah yang sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tinggi konflik selama masa transisi. Namun, periode analisisnya adalah 2005–2012, setelah sebagian besar ketidakpastian terkait transisi demokrasi telah dituntaskan. Hal ini khususnya berkaitan dengan sifat kekerasan kolektif yang berubah-ubah dari kekerasan episodik pada tahun-tahun sebelum 2005 menjadi kekerasan rutin pada tahun setelah 2005. *Kedua*, studi ini juga mengendalikan efek tetap waktu dan provinsi (*time and province-fixed effect*) secara bersamaan dan serangkaian faktor penentu kekerasan yang biasanya berada di bawah hipotesis peluang.

Tabel 4. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Rutin (Regresi Negatif Binomial)

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini	0.634	0.682				
Perkiraan_Gini			15.7***	15.4***		
PDRB per kapita	.021***	.021***			.048***	.047***
PDRB per kapita_kuadrat					-2.3e-04***	-2.2e-04***
Fraksionalisasi_etnis	-.594*		-.569*		-.585*	
Fraksionalisasi_agama		0.613		0.565		0.495
Pertumbuhan PDRB	-0.563	-0.681	-0.56	-0.674	-0.547	-0.667
Kemiskinan	-.021**	-.019*	-.02**	-.019*	-.021**	-.019*
Lamanya Bersekolah	.11*	0.101	.105*	0.097	0.091	0.085
Penduduk Usia Muda (15-24)	2.24	2.09	2.24	2.11	2.51	2.41
Boneka perkotaan (<i>urban dummy</i>)	.958*	0.778	0.861	0.694	.905*	0.737
Populasi (juta)	.576***	.596***	.44***	.462***	.543***	.561***
Konstan	0.56	0.484	-3.44*	-3.42*	0.665	0.569
Provinsi_ efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun_ efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi	-.699***	-.683***	-.66***	-.646***	-.714***	-.697***
Observasi	664	664	664	664	664	664

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan klaster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel "perkiraan Gini" (*predicted_Gini*) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, dikontrol untuk efek tetap provinsi dan waktu.



Gambar 5. Ketimpangan vertikal (Gini), pendapatan, dan kekerasan

Beberapa hasil penting dari variabel-variabel kontrol juga harus digarisbawahi. Variabel pertumbuhan ekonomi secara konsisten ternyata negatif, meski tidak signifikan, yang masih sesuai dengan hipotesis peluang untuk melakukan kekerasan. Pertumbuhan yang berjalan lebih lambat mengindikasikan rendahnya biaya kesempatan untuk terlibat kekerasan bagi para pesertanya. Rangkaian variabel demografis juga sejalan dengan hipotesis peluang. Tingkat kekerasan cenderung lebih tinggi di kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dan proporsi kaum muda lebih besar. Namun, koefisien negatif dan signifikan dari variabel kemiskinan keenam model tersebut berlawanan dengan harapan kami.

6.2 Tindak Kriminal dengan Kekerasan

Sekarang mari kita tinjau variabel tindak kriminal dengan kekerasan dengan data yang disediakan oleh SNPK. Hipotesis kami tentang hubungan antara ketimpangan dan tindak kriminal dengan kekerasan serupa dengan hipotesis kami tentang kekerasan rutin karena keduanya hampir memiliki kemiripan. Meskipun kekerasan rutin harus memuat dimensi kriminal, namun tidak bisa serta-merta diberi label sebagai kejahatan karena sifat kolektifnya mengarah pada konteks sosial yang lebih mendalam. Intinya, kejahatan dengan kekerasan lebih terbatas pada perilaku kriminal individual dan konteks sosialnya lebih lemah daripada kekerasan rutin. Sehubungan dengan kekerasan rutin, kami menemukan efek peningkatan kejahatan yang signifikan secara statistik terhadap ketimpangan vertikal, dan hubungan antara kejahatan dan pendapatan yang berbentuk lonceng (lihat, Tabel 5). Temuan kami tentang pengaruh positif ketimpangan terhadap kejahatan selaras dengan temuan dua studi baru-baru ini di Kolombia dan Meksiko (Poveda, 2011; Enamorado, *et al.*, 2014).

Hasil variabel kontrol lainnya juga sangat mendukung hipotesis peluang. Insiden tindak kriminal dengan kekerasan lebih tinggi akan lebih mungkin dialami oleh kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih lambat, angka kemiskinan lebih tinggi, dan jumlah penduduk berusia muda lebih besar. Pengaruh positif dan signifikan pendidikan terhadap kejahatan dengan kekerasan harus ditafsirkan dengan hati-hati. Kami menduga hubungan tersebut berupa kurva lonceng seperti dalam hal pendapatan. Oleh karena itu, seperti kasus pendapatan, dalam jangka panjang, pencapaian tingkat pendidikan lebih tinggi harus berkorelasi dengan frekuensi tindak kekerasan yang lebih rendah.¹² Namun, sebagaimana halnya kekerasan rutin, koefisien negatif dan signifikan dari variabel kemiskinan bertolak belakang dengan harapan kami.

¹²Ini adalah sebuah kesempatan menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, namun itu berada di luar cakupan studi ini.

Tabel 5. Ketimpangan Vertikal dan Kejahatan dengan Kekerasan (Regresi Negatif Binomial)

Variabel Terikat: Insiden Kejahatan dengan Kekerasan

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini	0.878	0.703				
Perkiraan_Gini			29.7***	27.4***		
PDRB per kapita	.025***	.022***			.074***	.069***
PDRB per kapita_kuadrat					-4.5e-04***	-4.1e-04***
Fraksionalisasi_etnis	-0.177		-0.222		-0.207	
Fraksionalisasi_agama		-1.62***		-1.58***		-1.53***
Pertumbuhan PDRB	-1.34***	-1.21***	-1.42***	-1.29***	-1.42***	-1.3***
Kemiskinan	-.025**	-.018*	-.026**	-.019*	-.026**	-.02**
Lamanya Bersekolah	.183***	.202***	.164***	.187***	.153***	.175***
Penduduk Usia Muda (15–24)	3.51**	3.97**	3.8**	4.18**	4.04**	4.4***
Perkotaan	0.672	0.762	0.488	0.581	0.537	0.622
Penduduk (juta)	.698***	.646***	.549***	.517***	.625***	.586***
Konstan	0.152	-0.328	-7.76***	-7.67***	0.277	-0.288
Provinsi_efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Year_efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi	-.757***	-.812***	-.776***	-.827***	-.804***	-.854***
Observasi	664	664	664	664	664	664

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan klaster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel “perkiraan Gini” (predicted_Gini) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, efek tetap provinsi dan waktu.

Temuan kami tentang pengaruh positif ketimpangan vertikal terhadap kekerasan rutin dan tindak kriminal dengan kekerasan sebagian besar konsisten. Selain itu, koefisien variabel ketimpangan vertikal tampak lebih konsisten dan lebih signifikan daripada serangkaian variabel kontrol pada beberapa model regresi alternatif. Hal tersebut menunjukkan keunggulan variabel ketimpangan dalam menjelaskan kekerasan dan kejahatan. Oleh karena itu, pesan utama kebijakan yang dapat ditarik dari temuan ini adalah meningkatnya ketimpangan berpengaruh buruk terhadap stabilitas masyarakat. Bagian berikutnya mengkaji peran ketimpangan dalam kekerasan etnis.

6.3 Kekerasan Etnis

Studi-studi sebelumnya telah menautkan kekerasan etnis dengan ketimpangan horizontal, tetapi tidak dengan ketimpangan vertikal karena yang terakhir ini lebih relevan dengan kekerasan rutin, sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Otsby *et al.*, 2011; Tadjoeeddin, Chowdhury, dan Murshed, 2012).¹³ Pada bagian ini, kami mengkaji pengaruh ketimpangan vertikal maupun ketimpangan horizontal terhadap kekerasan etnis. Kami mulai dengan ketimpangan vertikal. Sejauh kami ketahui, ini merupakan kajian pertama yang melihat tautan antara ketimpangan vertikal dengan kekerasan etnis di Indonesia.

¹³Fjelde dan Østby (2012) meneliti ketimpangan horizontal dan konflik komunal antarwilayah (unit subnasional) di Afrika dan menemukan bahwa wilayah dengan ketimpangan ekonomi horizontal yang tinggi memiliki risiko yang secara signifikan lebih tinggi untuk mengalami konflik antarkelompok.

Dua temuan utama sebelumnya mengenai kekerasan rutin, yaitu (i) efek peningkatan kekerasan dari ketimpangan vertikal, dan (ii) hubungan antara kekerasan dan pendapatan yang berbentuk-lonceng juga terlihat relevan dalam kasus kekerasan etnis (lihat Tabel 5). Hasil ini ditemukan setelah kontrol terhadap efek tetap provinsi dan waktu, fraksionalisasi etnis dan agama, dan serangkaian potensi kekerasan sesuai hipotesis peluang. Temuan ini menarik karena memperlihatkan fakta bahwa kekerasan etnis pasca-2005 di Indonesia memiliki karakteristik serupa dengan kekerasan rutin, sedangkan kekerasan etnis selama transisi demokrasi akhir 1990-an jelas bersifat episodik. Berbeda dengan kekerasan rutin, hipotesis peluang juga tampak kurang relevan dalam kasus kekerasan etnis; hanya variabel perkotaan yang muncul secara signifikan.

Pengaruh ketimpangan horizontal terhadap kekerasan etnis yang disajikan pada Tabel 7 tampak lebih kuat daripada ketimpangan vertikal yang disajikan pada Tabel 6. Itu karena pengaruh ketimpangan horizontal terhadap kekerasan etnis bersifat langsung, sementara pengaruh ketimpangan vertikal (Gini) adalah melalui perkiraan nilai Gini yang berasal dari regresi Kuznets.

Singkatnya, hasil di atas telah menunjukkan relevansi antara ketimpangan vertikal maupun horizontal dalam hal kekerasan etnis di Indonesia pasca-2005. Namun, seperti yang diperkirakan, kekuatan prediktif dari ketimpangan horizontal lebih kuat daripada ketimpangan vertikal dalam menjelaskan kekerasan etnis. Relevansi ketimpangan vertikal dalam menjelaskan kekerasan etnis adalah sesuatu yang baru dan hal demikian mengingatkan kita pada karakteristik yang berubah-ubah dari insiden kekerasan etnis belum lama ini yang kian memiliki kemiripan dengan kekerasan rutin, dalam arti tidak menunjukkan konsentrasi regional dan waktu yang jelas.

Tabel 6. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Etnis (Regresi Negatif Binomial)

Variabel Terikat: Insiden Kekerasan Etnis

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini	1.19	1.63				
Perkiraan_Gini			26.6**	29.7**		
PDRB per kapita	.029***	.032***			.073***	.081***
PDRB per kapita_kuadrat					-3.7e-04*	-4.2e-04**
Fraksionalisasi_etnis	-1.71**		-1.64**		-1.55	
Fraksionalisasi_agama		2.94**		2.86*		2.73*
Pertumbuhan PDRB	-1.69	-2.18	-1.41	-1.84	-1.34	-1.75
Kemiskinan	0.019	0.014	0.016	0.01	0.018	0.013
Lamanya Bersekolah	0.041	0.017	-4.80E-03	-0.037	-2.20E-03	-0.031
Penduduk Usia Muda (15–24)	-2.67	-3.24	-2.46	-2.91	-2.29	-2.73
Perkotaan	1.6**	0.942	1.46**	0.85	1.49**	0.898
Populasi (juta)	.925***	1.11***	.687***	.835***	.869***	1.03***
Konstan	-1.91	-1.84	-8.31**	-8.91**	-1.57	-1.38
Provinsi_ efek tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun_ efek tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi	.944***	.95***	.949***	.95***	.927***	.927***
Observasi	664	664	664	664	664	664

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan kluster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel “perkiraan Gini” (predicted_Gini) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, efek tetap provinsi dan waktu.

Tabel 7. Ketimpangan Horizontal dan Kekerasan Etnis (Regresi Binomial Negatif)

Variabel Terikat: Insiden Kekerasan Etnis

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)
HI (w_GCOV_etnis)	3.87***			
HI (w_GCOV_agama)		6.81***		
HI (GGINI_etnis)			5.53*	
HI (GGINI_agama)				17.5***
Fraksionalisasi_etnis	-1.92**		-2.08	
Fraksionalisasi_agama		2.43*		1.16
PDRB per Kapita	.07***	0.038	.077***	0.033
PDRB per Kapita_kuadrat	-3.6e-04*	-1.30E-04	-4.0e-04**	-2.00E-04
Pertumbuhan PDRB	-1.32	-0.822	-1.36	
Kemiskinan	7.60E-04	-6.40E-03	8.50E-03	
Lamanya Bersekolah	0.103	0.193	0.046	
Penduduk Usia Muda (15–24)	-3.42	-1.57	-3.06	
Perkotaan	0.992	-0.093	1.3*	
Populasi (juta)	.823***	.958***	.848***	
Konstan	-1.7	-3.06*	-1.44	-1.54***
Provinsi_ efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun_ efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi	.863***	.782***	.902***	.859***
Observasi	664	664	664	664

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan kluster galat standar tegar pada tingkat kabupaten.

6.4 Uji Ketegaran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, temuan kami tentang efek dari ketimpangan yang lebih tinggi terhadap peningkatan kekerasan terbukti setelah mengontrol efek tetap provinsi dan waktu. Dengan dimasukkannya efek provinsi, berarti regresi telah mengontrol karakteristik suatu provinsi yang spesifik dan tak teramati dan tak berubah antarwaktu (*time-invariant unobserved characteristics*). Efek tahun mengontrol karakteristik yang berubah antarwaktu dan tidak teramati (*time-variant unobserved characteristics*), serta tidak khas wilayah tertentu, seperti tahun pemilihan umum nasional dan guncangan eksternal akibat krisis keuangan global (GFC). Berdasarkan hipotesis peluang, model tersebut juga memasukkan beberapa variabel lain yang biasanya diduga memiliki tautan dengan kekerasan.

Walaupun kami bergantung pada ukuran insiden kekerasan yang terjadi, kami memeriksa kestabilan temuan kunci kami dengan menggunakan ukuran korban kekerasan rutin dan kekerasan etnis (lihat Lampiran 1, 2, dan 3). Temuan-temuan kunci kami bertahan dengan menggunakan ukuran korban tewas setelah mengontrol efek tetap provinsi dan waktu, fraksionalisasi etnis dan agama, serta serangkaian faktor penentu kekerasan lainnya.

Potensi masalah lainnya dengan model kami adalah kemungkinan terjadinya kausalitas terbalik (endogenitas) antara kekerasan dan ketimpangan. Meskipun kami menganggap adanya pengaruh

ketimpangan terhadap kekerasan, sebaliknya kekerasan dapat pula berdampak pada distribusi pendapatan karena hanya sebagian kecil anggota masyarakat saja yang biasanya akan terpengaruh oleh kehancuran fisik yang disebabkan oleh kekerasan. Argumen itu mungkin saja benar dalam hal insiden kekerasan episodik skala besar seperti yang dialami Indonesia selama masa transisi demokrasi. Namun, kami berpendapat bahwa itu adalah skenario yang tidak mungkin dalam hal insiden kekerasan rutin skala kecil dan jenis kekerasan etnis yang rutin terjadi di Indonesia pasca-2005. Dalam konteks itu, insiden kekerasan skala kecil tidak akan memiliki dampak serius pada distribusi pendapatan. Bagaimanapun juga, untuk mengantisipasi persoalan itu, kami melakukan regresi kunci dengan lag variabel bebas (*lag independent variables*) dan temuan kunci utama kami bertahan (lihat Lampiran 4, 5, dan 6).

VII. KESIMPULAN

Studi ini menemukan masalah ketimpangan ekonomi dalam proses pembangunan dan mengajukan hipotesis bahwa efek peningkatan kekerasan dari ketimpangan dapat membahayakan stabilitas masyarakat. Stabilitas masyarakat adalah sesuatu yang tak dapat diabaikan di negara yang besar dan beragam seperti Indonesia dengan demokrasi mudanya. Juga telah dibuktikan bahwa jenis-jenis ketimpangan alternatif dapat memengaruhi secara berbeda setiap jenis kekerasan kolektif. Oleh karena itu, menguraikan ketimpangan dan kekerasan ke dalam beberapa kategori adalah hal yang sangat penting.

Hasil empiris telah memberikan dukungan kuat bagi hipotesis yang berpendapat bahwa meningkatnya ketimpangan membahayakan stabilitas masyarakat berdasarkan data tentang kekerasan rutin, kekerasan etnis, dan kejahatan dengan kekerasan di beberapa provinsi di Indonesia yang sebelumnya dikategorikan sebagai wilayah “tinggi konflik.” Variabel ketimpangan tampak lebih signifikan dan konsisten sebagai faktor penentu kekerasan kolektif daripada sebagai serangkaian variabel yang mewakili hipotesis peluang kekerasan. Temuan-temuan ini didasarkan pada analisis data empiris periode 2005–2012. Kurun waktu tersebut relatif jauh lebih stabil dalam hal demokratisasi dan desentralisasi jika dibandingkan dengan situasi akhir 1990-an dan awal 2000-an.

Indonesia bercita-cita untuk terus tumbuh dan berkembang, menggapai tingkat pembangunan lebih tinggi, menjadi pemain utama di kawasan Asia dan, yang lebih penting, mengonsolidasikan demokrasi lebih lanjut. Untuk itu, sesuatu harus dilakukan untuk memecahkan masalah meningkatnya ketimpangan. Bukti baru ini memperlihatkan bahwa ketimpangan yang terus-menerus meningkat memang merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, kita harus memastikan bahwa mengatasi masalah ketimpangan masuk menjadi salah satu fokus eksplisit dalam agenda pembangunan.

DAFTAR ACUAN

- Acemoglu, Daron dan James A. Robinson (2006) *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Alesina, Alberto dan Roberto Perotti (1996) 'Income Distribution, Political Instability, and Investment.' *European Economic Review* 40 (6): 1203–28 [dalam jaringan] <<http://homepage.ntu.edu.tw/~kslin/macro2009/Alesina%20&%20Perotti%201996EER.pdf>> [23 Februari 2014].
- Barron, Patrick, Ashutosh Varshney, Blair Palmer, dan Sana Jaffrey (2009) 'Understanding Violent Conflict in Indonesia: A Mix Method Approach'. *Social Development Papers* 117. Washington, DC: World Bank [dalam jaringan] <<http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1164107274725/sdp117.pdf>> [8 Januari 2014].
- Barron, Patrick, Sana Jaffrey, dan Ashutosh Varshney (2014). 'How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia.' *Indonesian Social Development Papers*. Jakarta: World Bank [dalam jaringan] <<https://asiafoundation.org/resources/pdfs/HowLargeConflictsSubside.pdf>> [2 September 2014].
- Berg, Andrew, Jonathan D. Ostry, dan Jeromin Zettelmeyer (2012) 'What Makes Growth Sustained?' *Journal of Development Economics* 98 (2): 149–66. DOI: 10.1016/j.jdeveco. 2011.08.002 [5 February 2014].
- Booth, Anne (1999) 'Will Indonesia Break up?' *Inside Indonesia* 59 (July–September) [dalam jaringan] <<http://www.insideindonesia.org/will-indonesia-break-up>> [2 September 2014].
- Cameron, A. Colin dan Pravin K. Trivedi (1998) *Regression Analysis of Count Data*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cederman, Lars-Erik, Kristian Skrede Gleditsch, dan Halvard Buhaug (2013) *Inequality, Grievances, and Civil War*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Christian, Robert (2014) 'Pope Francis' Tweet about Equality is the Wake-up Call We All Need' *Time* May 2 [dalam jaringan] <<http://time.com/85864/pope-francis-tweet-about-inequality-is-the-wake-up-call-we-all-need/>> [11 Juni 2014].
- Chua, Amy (2002) *World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability*. New York: Doubleday.
- Claessens, Stijn, Simeon Djankov, dan Larry H.P. Lang (1999) 'Who Controls East Asian Corporations?' *Policy Research Working Paper* No. 2054. Washington, DC: World Bank [dalam jaringan] <http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/24/000094946_99031911113874/Rendered/PDF/multi_page.pdf> [10 Juli 2014].
- Collier, Paul dan Anke Hoeffler (2004) 'Greed and Grievance in Civil War' *Oxford Economic Papers* 56 (4): 563–95. DOI: 10.1093/oep/gpf064 [5 Januari 2014].

- Collier, Paul, Anke Hoeffler, dan Dominic Rohner (2009) 'Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War'. *Oxford Economic Papers* 61 (1): 1–27. DOI: 10.1093/oep/gpn029 [5 Januari 2014].
- Cramer, Christopher (2005) 'Inequality and Conflict: A Review of an Age-Old Concern.' *Identities, Conflict and Cohesion Programme Paper* 11. Geneva: UNRISD [dalam jaringan] <[http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=0501D4F6B3083076C12570B4004F0D5B&parentdoctype=paper&netitpath=80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/0501D4F6B3083076C12570B4004F0D5B/\\$file/cramer.pdf](http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=0501D4F6B3083076C12570B4004F0D5B&parentdoctype=paper&netitpath=80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/0501D4F6B3083076C12570B4004F0D5B/$file/cramer.pdf)> [5 Januari 2014].
- Cribb, Robert (1999) 'Not the Next Yugoslavia: Prospect for Disintegration of Indonesia' *Australian Journal of International Affairs* 53 (2): 169–78. DOI 10.1080/00049919993944 [4 Februari 2014].
- Dhanani, S., I. Islam dan A. Chowdhury (2009) *The Indonesia Labour Market: Challenge and Changes*. London: Routledge.
- Dube, Arindrajit dan Ethan Kaplan (2012) 'Occupy Wall Street and the Political Economy of Inequality.' *The Economists' Voice* 9 (3) [dalam jaringan] <http://people.umass.edu/adube/DubeKaplan_EV_OWS_2012.pdf> [3 Mei 2014].
- Easterly, William (2007) 'Inequality Does Cause Underdevelopment: Insights from a New Instrument.' *Journal of Development Economics* 84 (2): 755–76. <<http://www.biu.ac.il/soc/ec/students/teach/509/data/EasterlyJDE2007.pdf>> [26 April 2014].
- Esteban, Joan, Laura Mayoral, dan Debraj Ray (2012) 'Ethnicity and Conflict: An Empirical Study.' *American Economic Review* 102 (4): 1310–1342 [dalam jaringan] <<http://www.nyu.edu/econ/user/debraj/Papers/EstebanMayoralRayAER.pdf>> [5 Januari 2014].
- Fearon, James D. dan David D. Laitin (2003) 'Ethnicity, Insurgency, and Civil War' *American Political Science Review* 97 (1):75–90 [dalam jaringan] <http://www.uky.edu/~clthyn2/PS439G/readings/fearon_laitin_2003.pdf> [5 Januari 2014].
- Fjelde, Hanne dan Gudrun Østby (2012) 'Economic Inequality and Intergroup Conflicts in Africa.' Paper prepared for presentation at the Democracy as Idea and Practice conference, Oslo, January 12–13 [dalam jaringan] <<http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/conferences/2012/papers-2012/Fjelde-Oestby-wshop7.pdf>> [5 Januari 2014].
- Frankema, Ewout dan Daan Marks (2009) 'Was It Really "Growth with Equity" under Soeharto? A Theil Analysis of Indonesian Income Inequality in 1961–2002.' *Economics and Finance in Indonesia* 57 (1): 47–76.
- Goda, Thomas (2013) 'The Role of Income Inequality in Crisis Theories and in the Subprime Crisis.' *Post Keynesian Economics Study Group Working Paper* 1305 [dalam jaringan] <<https://www.Postkeynesian.net/downloads/wpaper/PKWP1305.pdf>> [2 Mei 2014].
- Gurr, Ted R. (1970) *Why Men Rebel*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

- Hegre, Håvard dan Nicholas Sambanis (2006) 'Sensitivity Analysis of Empirical Results on Civil War Onset.' *Journal of Conflict Resolution* 50 (4): 508–35. DOI: 10.1177/0022002706289303 [10 April 2014].
- Hegre, Håvard, Tanja Ellingsen, Scott Gates, dan Nils Petter Gleditsch (2001) 'Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Civil Change, and Civil War 1816–1992.' *American Political Science Review* 95 (1): 33–48? [dalam jaringan] <http://www.uky.edu/~clthyn2/PS439G/readings/hegre_et_al_2001.pdf> [26 April 2014].
- Hirschman, Albert O. (1973) 'The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development.' *World Development* 1 (12): 29–36. DOI: 10.1016/0305-750X(73)90109-5 [11 April 2014].
- Horowitz, Donald (1985) *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Huntington, Samuel P. (1968) *Political Order in Changing Societies*. New Haven and London: Yale University Press.
- Kanbur, Ravi (2007) 'Poverty, Inequality and Conflict.' *AEM Working Paper 2007-01*. Ithaca, N.Y.: Cornell University [dalam jaringan] <http://publications.dyson.cornell.edu/research/researchpdf/wp/2007/Cornell_Dyson_wp0701.pdf> [5 Januari 2014].
- Kaplan, Robert D. (2000) *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War*. New York: Random House.
- Kumhof, Michael dan Romain Rancière (2010) 'Inequality, Leverage and Crises.' *IMF Working Paper* 10/268. Washington, D.C: International Monetary Fund [dalam jaringan] <<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.pdf>> [22 Juni 2014].
- Kuznets, Simon (1955) 'Economic Growth and Income Inequality.' *American Economic Review* 45 (1): 1–28 [dalam jaringan] <<https://www.aeaweb.org/aer/top20/45.1.1-28.pdf>> [29 January 2014].
- Lewis, W. Arthur (1976) 'Development and Distribution.' In *Employment, Income Distribution and Development Strategy*. A. Cairncross, M. Puri (eds.) London: Macmillan.
- Lina, Yang (2013) 'Gini Coefficient Release Highlights China's Resolve to Bridge Wealth Gap.' *Biz China Weekly* No. 81 [dalam jaringan] <http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-01/21/c_132116852.htm> [2 September 2014].
- Mancini, Luca, Frances Stewart, dan Graham Brown (2008) 'Approaches to the Measurement of Horizontal Inequalities' In *Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies*. F. Stewart (ed.) Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Mitra, Anirban dan Debraj Ray (2013) 'Implications of an Economic Theory of Conflict: Hindu-Muslim Violence in India.' *NBER Working Paper* No. 19090 [dalam jaringan] <<http://www.nber.org/papers/w19090>> [2 September 2014].
- Muller, Edward N. (1997) 'Economic Determinants of Democracy.' In *Inequality, Democracy and Economic Development*. M. I. Midlarsky (ed.) Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

- Nafziger, E. Wayne dan Juha Auvinen (2002) 'Economic Development, Inequality, War and State Violence.' *World Development* 30 (2): 153–63. DOI: 10.1016/S0305-750X(01)00108-5 [2 Mei 2014].
- Newell, Jim (2013) 'Obama: Income Inequality is 'Defining Challenge of Our Time.'" *The Guardian* December 4 [dalam jaringan] <<http://www.theguardian.com/world/2013/dec/04/obama-income-inequality-minimum-wage-live>> [21 Mei 2014].
- Olson, Mancur (1965) *The Logic of Collective Action*. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.
- Østby, Gudrun dan Henrik Urdal (2010) 'Education and Civil Conflict: A Review of the Quantitative, Empirical Literature.' Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report: The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education [dalam jaringan] <<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190777e.pdf>> [11 April 2014].
- Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Mohammad Zufan Tadjoeeddin, Syed Mansoob Murshed, dan Havarid Strand (2011) 'Population Pressure, Horizontal Inequality and Political Violence: A Disaggregated Study of Indonesian Provinces, 1990–2003' *Journal of Development Studies* 47(3): 377–98. DOI: 10.1080/00220388.2010.506911 [11 April 2014].
- Østby, Gudrun (2008) 'Polarization, Horizontal Inequalities and Violent Civil Conflict' *Journal of Peace Research* 45 (2): 143–62. DOI: 10.1177/0022343307087169 [11 April 2014].
- Przeworski, Adam, Michael Alvarez, José A. Cheibub, dan Fernando Limongi (2000) *Democracy and Development: Political Institutions and Material Well-being in the World, 1950–1990*. New York: Cambridge University Press.
- Rajan, Raghuram (2010) *Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Ravallion, Martin (2011) 'A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China, and India.' *The World Bank Research Observer* 26 (1): 71–104 [dalam jaringan] <<http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/02/17703274/comparative-perspective-poverty-reduction-brazil-china-india>> [6 March 2014].
- Ross, Michael L. (2004) 'What Do We Know about Natural Resources and Civil War?' *Journal of Peace Research* 41 (3): 337–56 [dalam jaringan] <<http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/whatdoweknow.pdf>> [10 April 2014].
- Russett, Bruce M. (1964) 'Inequality and Instability: The Relation of Land Tenure to Politics' *World Politics* 16: 442–54. DOI: <http://dx.doi.org/10.2307/2009581> [4 Maret 2014].
- Snyder, Jack (2000) *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York, London: W.W. Norton & Company.
- Stewart, Frances (ed.) (2008) *Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies*. Basingstoke, U.K.: Palgrave Macmillan.
- . (2000) 'Crisis Prevention: Tackling Horizontal Inequalities' *Oxford Development Studies* 28 (3): 245–62 [dalam jaringan] <<http://csf.rrojasdatabank.info/crisisprevention2000.pdf>> [21 Mei 2014].

- Stiglitz, Joseph E. (2012) *The Price of Inequality*. New York: W.W. Norton.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan (2014) *Explaining Collective Violence in Contemporary Indonesia: From Conflict to Cooperation*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- . (2013a) 'Educated but Poor: Localized Ethnic Violence during Indonesia's Democratic Transition' *International Area Studies Review* 16 (1): 24–49 [dalam jaringan] <http://www.academia.edu/10238140/Educated_but_poor_Localized_ethnic_violence_during_Indonesia_s_democratic_transition> [11 Juni 2014].
- . (2013b) 'Earnings, Productivity and Inequality in Indonesia.' Report for the ILO Jakarta.
- . (2013c) 'Miracle that Never Was: Disaggregated Level of Inequality in Indonesia.' *International Journal of Development Issues* 12 (1): 22–35. DOI: <<http://dx.doi.org/10.1108/14468951311322091>> [11 Juni 2014].
- . (2011) 'The Economic Origins of Indonesia's Secessionist Conflicts' *Civil Wars* 13 (3): 312–32. DOI: 10.1080/13698249.2011.600009 [24 Januari 2014].
- . (2002) 'Anatomy of Social Violence in the Context of Transition: The Case of Indonesia 1990–2001.' *UNSFIR Working Paper* 02/01. Jakarta: UNSFIR [dalam jaringan] <http://www.academia.edu/10236474/Anatomy_of_Social_Violence_in_the_Context_of_Transition_The_case_of_Indonesia_1990-2001> [24 Januari 2014].
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, Anis Chowdhury, dan S. Mansoob Murshed (2012) 'Routine Violence in the Island of Java, Indonesia: Neo-Malthusian and Social Justice Perspectives' In *Climate Change, Human Security and Violent Conflict*. J. Scheffran et al. (eds.) Berlin: Springer.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan dan Syed Mansoob Murshed (2007) 'Socio-Economic Determinants of Everyday Violence in Indonesia: An Empirical Investigation of Javanese Districts, 1994–2003' *Journal of Peace Research* 44 (6): 689–709. DOI: 10.1177/0022343307082063 [6 Maret 2014].
- The Jakarta Post (2014) 'RI 10th-largest Economy: WB' *The Jakarta Post*, 5 May [dalam jaringan] <<http://www.thejakartapost.com/news/2014/05/05/ri-10th-largest-economy-wb.html>> [21 Mei 2014].
- . (2001) 'A Global Citizenship for Children.' *The Jakarta Post*, 20 November [dalam jaringan] <<http://m.thejakartapost.com/news/2001/11/20/a-global-citizenship-children.html>> [21 Mei 2014].
- Thee, Kian Wie (ed.) (2002) *Recollections: The Indonesian Economy, 1950s–1990s*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- UN (2013) *Inequality Matters: Report of the World Social Situation 2013* New York: UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) [dalam jaringan] <<http://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/InequalityMatters.pdf>> [3 Juli 2014].

- UNCTAD (2012) 'Breaking the Cycle of Exclusion and Crisis.' *Policy Brief* No. 05, June [dalam jaringan] <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/uxiiipb2012d5_en.pdf> [2 September 2014].
- UNSFIR (2003) 'Revisiting Inequality and Growth in Indonesia.' Paper presented at the XV Congress of the Indonesian Economist Association (ISEI), Batu, Malang, 14 July.
- Urdal, Henrik (2012) 'Demography and Armed Conflict: Assessing the Role of Population' In *Elgar Companion to Civil War and Fragile States*. Graham Brown dan Arnim Langer (eds.) Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- . (2008) 'Population, Resources and Political Violence: A Sub-national Study of India 1956–2002.' *Journal of Conflict Resolution* 52 (4): 590–617. DOI: 10.1177/00220027 08316741 [22 Juni 2014].
- . (2006) 'A Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence' *International Studies Quarterly*, 50 (3): 607–29 [dalam jaringan] <<http://ernie.itpir.wm.edu/pdf/Unknown/4092795.pdf>> [2 September 2014].
- Varshney, Ashutosh, Mohammad Zulfan Tadjoeddin, dan Rizal Panggabean (2008) 'Creating Datasets in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990–2003)' *Journal of East Asian Studies* 8 (3): 361–94 [dalam jaringan] <http://ashutoshvarshney.net/wp-content/files_mf/creatingdatasetsininformationpoorenvironmentpatternsofcollectiveviolenceinindonesia19902003.pdf> [24 Januari 2014].
- Wilkinson, Richard G. dan Kate Pickett (2009) *The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better*. London: Allen Lane.
- Wilson, Chris (2015) 'Illiberal Democracy and Violent Conflict in Contemporary Indonesia.' In *Democratization* 22 (7): 1317-1337.
- Winters, Jeffrey A. (2013) 'Oligarchy and Democracy in Indonesia.' *Indonesia* 96 (October): 11–34 [dalam jaringan] <<http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=seap.indo/1381338363>> [3 September 2014].
- World Bank (1993) *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Yang, Chen (2013) 'China's 'Above Warning Level' Income Gap Shows Inequality.' *Global Times* [dalam jaringan] <<http://www.globaltimes.cn/content/756786.shtml>> [10 April 2014].
- Yusuf, Arief Anshory (2014) 'Trend of Inequality in Indonesia.' Keynote address delivered in the workshop Mapping the Impact of Inequality in Indonesia, The SMERU Research Institute, 17 Juni, Jakarta.
- . (2006) 'On the Re-assessment of Inequality in Indonesia: Household Survey or National Account?' *Working Paper in Economics and Development Studies* No. 200605. Pajajaran University, Bandung [dalam jaringan] <<http://core.ac.uk/download/pdf/9317784.pdf>> [10 April 2014].
- Zakaria, Fareed (2003) *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. New York: WW. Norton.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel A1. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Rutin (Ukuran Korban Jiwa)

Variabel Terikat: Korban Jiwa Akibat Kekerasan Rutin

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini	-1.15	-0.926				
Perkiraan Gini			10.1*	12*		
PDRB per kapita	.011**	.012**			.03**	.035**
PDRB per kapita_kuadrat					-1.60E-04	-1.9e-04*
Fraksionalisasi_etnis	-.781*		-.718*		-.703*	
Fraksionalisasi_agama		0.294		0.174		0.11
Pertumbuhan PDRB	-0.55	-0.738	-0.556	-0.725	-0.567	-0.736
Kemiskinan	-2.60E-03	4.50E-05	-3.10E-03	-5.30E-04	-3.10E-03	-4.10E-04
Lamanya Bersekolah	-0.04	-0.049	-0.048	-0.057	-0.054	-0.063
Penduduk Usia Muda (15–24)	-0.863	-0.835	-1.03	-0.899	-0.83	-0.667
Perkotaan	0.172	-5.30E-03	0.039	-0.129	0.055	-0.106
Populasi (juta)	.609***	.639***	.539***	.562*	.591***	.615***
Konstan	0.556	0.273	-2.34	-3.09*	0.272	-7.40E-03
Provinsi_efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun-efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi	-.331*	-.31*	-.331*	-.312*	-.343*	-.325*
Observasi	664	664	664	664	664	664

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan kluster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel “perkiraan Gini” (predicted_Gini) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, efek tetap provinsi dan waktu.

LAMPIRAN 2

Tabel A2. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Etnis (Ukuran Korban Jiwa)

Variabel Terikat: Korban Jiwa Akibat Kekerasan Etnis

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini	3.16	3.49				
Perkiraan Gini			14.6	33*		
PDRB per kapita	-0.01	0.012			0.047	.097**
PDRB per kapita_kuadrat					-5.80E-04	-9.4e-04**
Fraksionalisasi_ etnis	-3.34**		-2.83*		-2.91*	
Fraksionalisasi_ agama		-1.68		-1.86		-1.92
Pertumbuhan PDRB	-7.3***	-8.61***	-6.69***	-7.45***	-6.69***	-7.43***d
Kemiskinan	0.109	.099*	.112*	.105*	.11*	.105*
Lamanya Bersekolah	0.12	0.236	0.032	0.092	0.024	0.083
Penduduk Usia Muda (15–24)	-4.4	-2.86	-2.92	-1.07	-3.21	-1.28
Perkotaan	2.81	1.02	2.86	1.26	2.82	1.2
Populasi (juta)	1.68**	2.15*	1.75**	1.94**	1.54*	1.75*
Konstan	-6.69*	-8.62**	-9.92*	-16.3***	-5.83*	-7.46**
Provinsi_ efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun-efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi	2.55***	2.57***	2.55***	2.56***	2.55***	2.55***
Observasi	664	664	664	664	664	664

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan klaster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel “perkiraan Gini” (predicted_Gini) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, efek tetap provinsi dan waktu.

LAMPIRAN 3

Tabel A3. Ketimpangan Horizontal dan Kekerasan Etnis (Ukuran Korban Jiwa)

Variabel terikat: Korban Jiwa Akibat Kekerasan Etnis

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)
HI (w_GCOV_etnis)	9.95***			
HI (w_GCOV_agama)		17.7***		
HI (GGINI_etnis)			20.3***	
HI (GGINI_agama)				49.2***
Fraksionalisasi etnis	-4.14**		-4.89***	
Fraksionalisasi agama		-4.31		-7.47**
PDRB per Kapita	0.05	0.029	0.077	-0.048
PDRB per Kapita kuadrat	-5.80E-04	-4.80E-04	-7.7e-04*	6.80E-05
Pertumbuhan PDRB	-6.23***	-4.14**	-6.55***	-1.96
Kemiskinan	0.053	0.064	0.06	0.088
Lamanya Bersekolah	0.218	.705**	0.144	.467**
Penduduk Usia Muda (15–24)	-11.1	2.53	-11.2	-2.06
Perkotaan	2.2	-1.47	2.61	0.561
Populasi (juta)	1.88E+00	1.6	1.92*	1.59*
Konstan	-3.6	-13.1***	-2.92	-9.39***
Provinsi_ efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun-efek tetap	Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi	2.46***	2.35***	2.48***	2.36***
Observasi	664	664	664	664

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan kluster galat standar tegar pada tingkat kabupaten.

LAMPIRAN 4

Tabel A4. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Rutin (Lag Variabel Bebas)

Variabel Terikat: Insiden Kekerasan Rutin						
Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini						
Perkiraan_Gini			12.1**	10.9**		
PDRB per kapita					.039***	.036***
PDRB per kapita_ kuadrat					-1.8e-04**	-1.6e-04**
Fraksionalisasi_etnis			-0.16		-0.15	
Fraksionalisasi_agama				1.38		1.28
Pertumbuhan PDRB			-1.02***	-1.1***	-1.04***	-1.12***
Kemiskinan			-0.016	-0.017	-0.016	-0.017
Lamanya Bersekolah			.09*	0.072	0.08	0.064
Penduduk Usia Muda (15–24)			2.29	2.01	2.65	2.37
Perkotaan			0.549	0.452	0.545	0.454
Populasi (juta)			3.4e-07***	3.6e-07***	4.1e-07***	4.3e-07***
Konstan			-2.33	-1.81	1.14	1.27
Provinsi _efek tetap			Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun_efek tetap			Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi			-.479***	-.501***	-.513***	-.533***
Observasi			663	663	663	663

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan klaster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel “perkiraan Gini” (predicted_Gini) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, efek tetap provinsi dan waktu.

LAMPIRAN 5

Tabel A5. Ketimpangan Vertikal dan Kekerasan Etnis (Lag Variabel Bebas)

Variabel Terikat: Insiden Kekerasan Etnis						
Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini						
Perkiraan_Gini			32.7**	35.2**		
PDRB per kapita					.1***	.105***
PDRB per kapita_ kuadrat					-6.4e-04***	-6.8e-04***
Fraksionalisasi_etnis			-1.34*		-1.21*	
Fraksionalisasi_agama				3.02**		2.9*
Pertumbuhan PDRB			-1.38***	-1.55***	-1.55***	-1.71***
Kemiskinan			1.10E-04	-1.50E-03	1.30E-03	-2.50E-04
Lamanya Bersekolah			-0.104	-0.125	-0.102	-0.119
Penduduk Usia Muda (15–24)			1.39	0.817	1.55	0.993
Perkotaan			0.467	3.70E-03	0.403	-0.031
Populasi (juta)			4.3e-07***	5.6e-07***	5.4e-07***	6.6e-07***
Konstan			-11.2**	-12**	-1.71	-1.77
Provinsi _efek tetap			Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun _efek tetap			Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi			.993***	.952***	.964***	.924***
Observasi			663	663	663	663

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan kluster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel “perkiraan Gini” (predicted_Gini) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, efek tetap provinsi dan waktu.

LAMPIRAN 6

**Tabel A6. Ketimpangan Vertikal dan Tindak Kriminal dengan Kekerasan
(Lag Variabel Bebas)**

Variabel Dependen: Insiden Kejahatan Kekerasan

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini						
Perkiraan_Gini			14.4***	12.6***		
PDRB per kapita					.049***	.045***
PDRB per kapita_ kuadrat					-2.8e-04***	-2.6e-04***
Fraksionalisasi_etnis			0.078		0.066	
Fraksionalisasi_agama				1.92*		1.84*
Pertumbuhan PDRB			-1.29***	-1.32***	-1.31***	-1.34***
Kemiskinan			-.022**	-.023**	-.022**	-.023**
Lamanya Bersekolah			.128**	.114**	.115**	.103**
Penduduk Usia Muda (15–24)			3.46**	3.12**	3.81**	3.46**
Perkotaan			0.359	0.239	0.339	0.22
Populasi (juta)			4.4e-07***	4.5e-07***	4.8e-07***	4.93e.07***
Konstan			-2.73*	-1.98	1.46**	1.64**
Provinsi _efek tetap			Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun_efek tetap			Ya	Ya	Ya	Ya
Overdispersi			-.479***	-.517***	-.502***	-.538***
Observasi			663	663	663	663

Keterangan: Signifikan pada tingkat *10%, **5%, ***1%; regresi adalah dengan klaster galat standar tegar pada tingkat kabupaten; variabel "perkiraan Gini" (predicted_Gini) diambil dari hubungan antara ketimpangan dan pendapatan tipe-Kuznets, efek tetap provinsi dan waktu.

The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www. smeru. or.id

Facebook : The SMERU Research Institute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : SMERU Research Institute

Scan Here

